

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA
SURAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi**

Oleh :

AGATA IKA FEBRILIANAWATI

D0106003

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret

Pada hari :
Tanggal :

Panitia Penguji

Ketua : Dra. Hj. Lestariningsih, M.Si ()
NIP. 195310091980032003

Sekretaris : Dra. Sudaryanti, M.Si ()
NIP. 195704261986012002

Penguji : Dra. Sri Yuliani, M.Si ()
NIP. 196307301990032002

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Drs. Supriyadi SN., SU
NIP. 195301281981031001

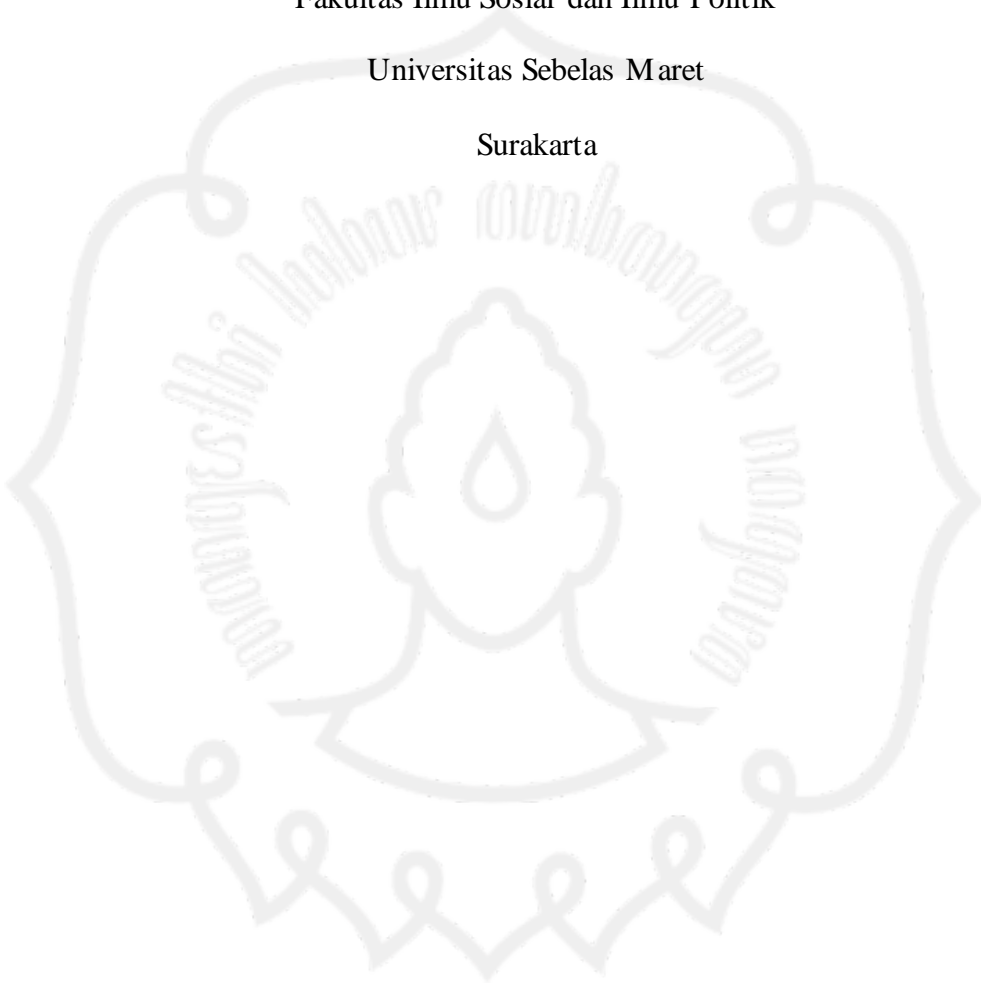
PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Pembimbing Skripsi

Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

MOTTO

Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.
(Yosua 1:9)

Tiada yang mustahil dari perjuangan, kesabaran dan doa. Kita hanya memerlukan napas panjang dan inovasi tiada henti untuk mengarahkan perahu kehidupan pada pelabuhan harapan.
(Anne Avantie)

Pengetahuan adalah kekayaan yang tiada akan tercuri dan hanya kematian yang mampu meraup lentera pengetahuan didalam jiwamu.
(Khalil Gibran)

Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak; biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya waktu panen.
(Amsal 6: 6-8)

Jalan pemalas adalah berliku, terjal dan berduri. Maka jadilah rajin, karena jalan orang rajin adalah lurus. Keinginan bagi pemalas hanya menjadi sebuah harapan semata. Tapi keinginan bagi orang rajin adalah harapan yang akan menjadi kenyataan yang sempurna.
(Penulis)

Seperti batu karang, aku tak akan jatuh terhempas oleh deburan gelombang dan akan tetap berdiri dengan penuh Percaya Diri, yakin dan semangat bahwa aku pasti bisa, bisa melakukan sesuatu sejauh aku selalu berusaha, bekerja dan berdoa.

(Penulis)

H A L A M A N P E R S E M B A H A N

Dengan penuh hormat, karya ini kupersembahkan kepada:

- ♥ *Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan membimbing setiap langkahku.*
- ♥ *Ayah dan ibuku yang selalu mendukung dalam doa dan pengorbanan.*

- ♥ *Adikku tersayang, Yosa yang selalu menghilangkan kepenatanku dengan canda tawanya.*
- ♥ *Refyku tercinta terimakasih untuk doa dan semangat yang tiada henti.*

- ♥ *Temanku Ana, terimakasih untuk bantuan besarnya.*
- ♥ *Teman kostku Anggi, aneh tapi bisa menyegarkan kembali pikiranku yang penat.*

- ♥ *Teman-teman akrabku "C E M P L U K", tetaplah satu dalam ikatan persahabatan yang sejati, always keep contact anywhere and anywhen.*
"S E M A N G A T!"
- ♥ *Semua sahabatku di FISIP AN, khususnya kelas A angkatan 2006, aku senang sekali dapat bertemu dan melewati masa perkuliahan dengan kalian.*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA SURAKARTA.”**

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan khusus kepada:

1. Dra. Sri Yuliani, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan pelajaran yang selalu baru bagi Penulis.
2. Drs. Sukadi, M.Si selaku Pembimbing Akademis, atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Drs. Sudarto, M.Si dan Bapak Drs. Agung Priyono, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Drs. Supriyadi SN. SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Segenap pegawai Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Surakarta, Ibu Wiwiek Dwi Hesti, S. Sos selaku Sekretaris DPP Surakarta, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan PKL serta Bapak Didik Anggono HKS,S.HUT selaku Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta yang memberikan kemudahan di dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak R. Sigit Pramono selaku Kepala Pasar Pangungrejo serta beberapa PKL yang kini disebut pedagang pasar dimana mereka juga banyak memberikan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki. Sebagai kata penutup, Penulis percaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Prodi Ilmu Administrasi Negara, serta bagi pihak-pihak yang memerlukannya .

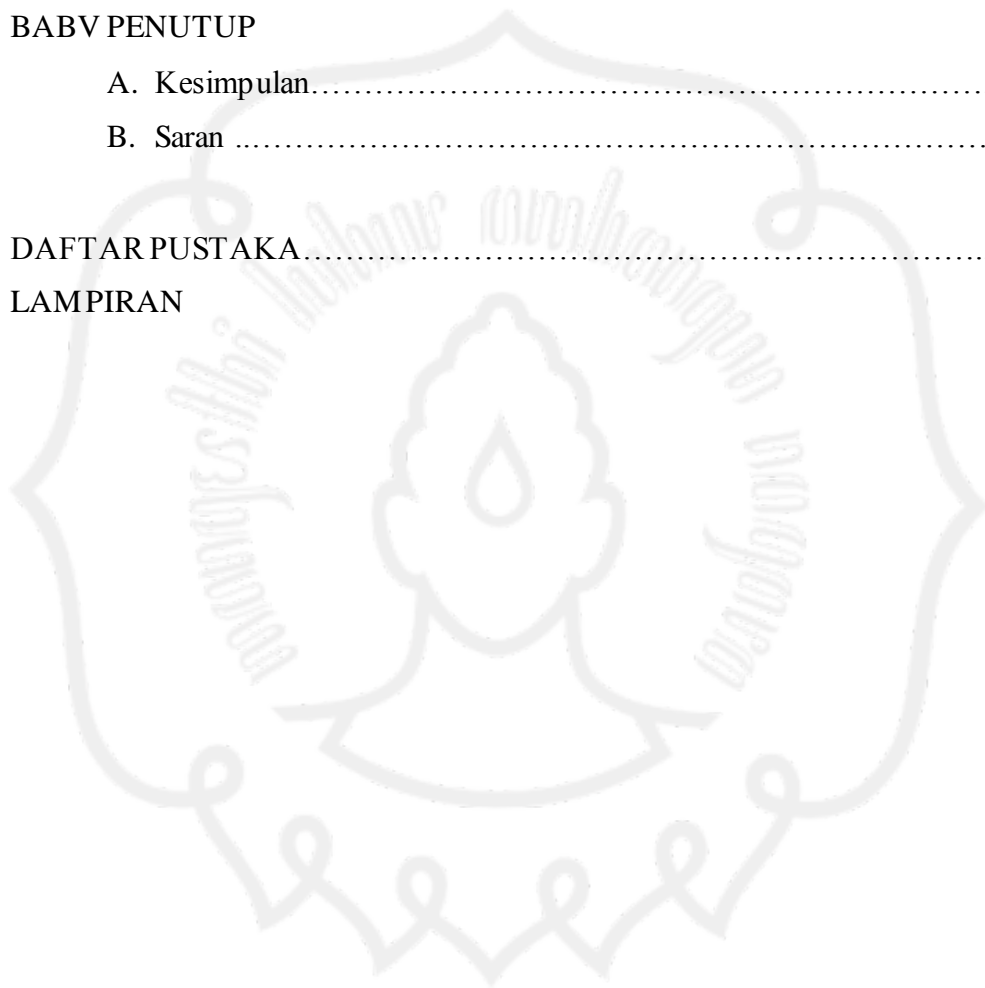
Surakarta, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber data.....	45
D. Teknik pengumpulan data.....	46
E. Metode penarikan sampel.....	47
F. Teknik penarikan sampel.....	48
G. Validitas data.....	48

H. Teknik analisis data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	
A. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Surakarta.....	53
B. Efektivitas kebijakan relokasi PKL.....	68
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	

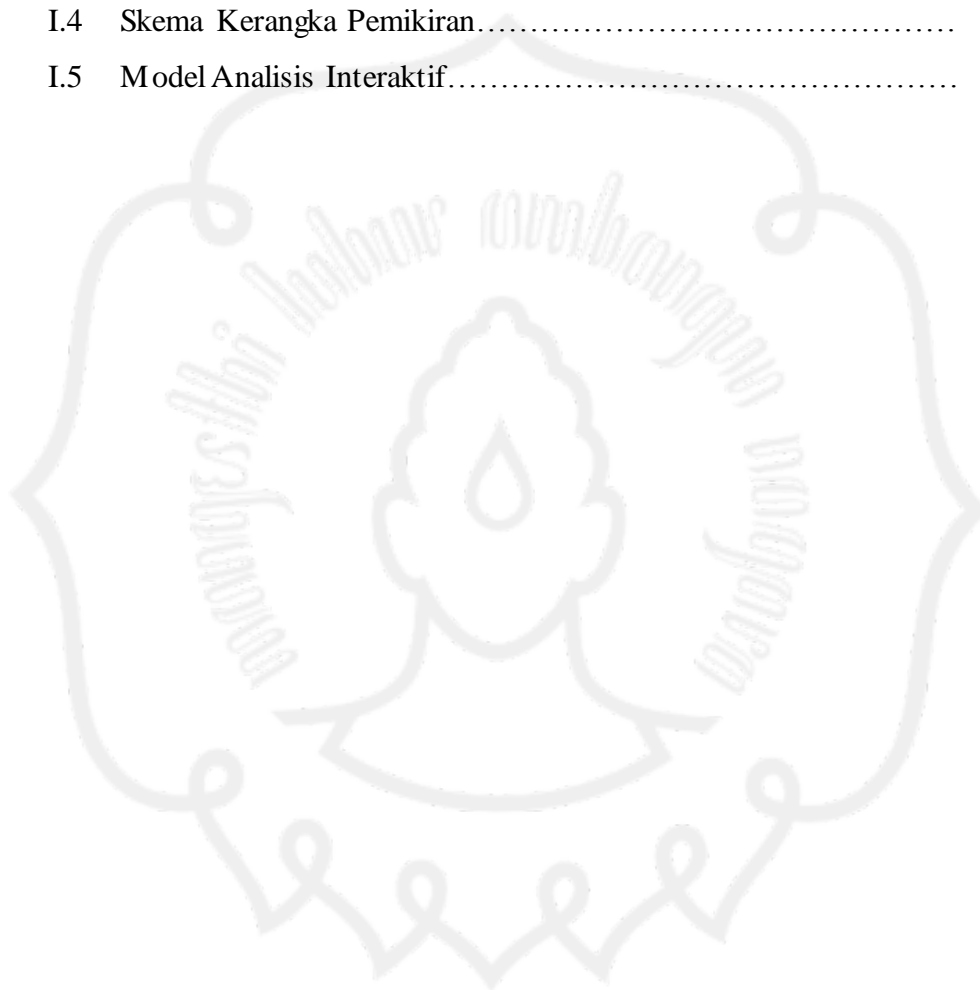


DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel II.1	Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2007...	53
Tabel II.2	Tipe Bangunan/ Tempat PKL yang Cenderung Menetap	58
Tabel II.3	Jenis Dagangan PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara.....	59
Tabel II.4	Waktu Berdagang PKL	60
Tabel II.5	Pengolahan Limbah PKL.....	61
Tabel II.6	Kebersihan dan Kerapian Lingkungan PKL.....	62
Tabel IV.1	Matrik Tahapan kegiatan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara.....	90
Tabel IV.2	Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara.....	109

DAFTAR BAGAN

Bagan	Judul Bagan	Halaman
I.1	Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle.....	15
I.2	Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn	20
I.3	Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian Dan Sabatier	23
I.4	Skema Kerangka Pemikiran.....	36
I.5	Model Analisis Interaktif.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
III.1	Trotoar terbengkalai yang memancing tumbuhnya PKL.....	55
III.2	Perubahan kondisi fisik PKL dan Tipe bangunan bongkar pasang dan gerobag.....	59
III.3	Kondisi PKL Semi Permanen dan Permanen tanpa jaringan utilitas yang lengkap	63
III.4	Fasilitas di Pasar Panggunrejo: Mushola, Toilet dan Kontener Sampah.....	82
III.5	Kios Bertingkat di Pasar Panggunrejo.....	82
III.6	Pembongkaran kios PKL dan kondisi kios setelah dibongkar dan diruntuhkan.....	108

Abstrak

AGATA IKA FEBRILIANAWATI. D0106003. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.

PKL merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan. Seperti halnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Keberadaan PKL dianggap telah mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemkot melaksanakan kebijakan relokasi PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Pasar Panggungrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu juga data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di dekat Kampus Ketingan UNS dan kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. Sedangkan apabila efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL yang kini disebut para pedagang pasar.

Abstract

AGATA IKA FEBRILIANAWATI. D0106003. EFFECTIVENESS OF POLICY RELOCATION OF STREET VENDORS IN KI HAJAR DEWANTARA ROAD SURAKARTA. Thesis. Public Administration Study Program. Department of Administration Science. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2010.

Street vendor seller is one of the informal business sector which not infrequently cause a problem in urban areas. Like the street vendor seller in the back of Kentingan Campus of Sebelas Maret University. The presence of street vendor seller are considered to disturb orderliness and cleanliness of the city. Therefore, based on Perda No.8 of 1995 concerning Settlement and Construction of street vendors, local government implementing relocation policies in Ki Hajar Dewantara Road. This study aims to determine the effectiveness of relocation policy in Ki Hajar Dewantara Road and the factors that influence the effectiveness of these policies.

The type of this research is qualitative descriptive. The location of the research is in the Panggunrejo Market. The data sources used include the primary data obtained through interviews. In addition, secondary data derived from the documents relating to the research. Data collection techniques that is by interview, observation, and documentation. The sampling technique used is nonprobability sampling with the type of purposive sampling. The data analysis technique used is the technique of interactive analysis that includes three points consisting of: data reduction, data presentation and verification and conclusion. Whereas the data used to test the validity of data triangulation.

The results of this research indicate that the relocation policy of street vendor seller in Ki Hajar Dewantara Road in terms of the implementation is effective because it achieved the policy objectives of creating a free trader in the region near the Campus Kentingan UNS and the region associated with the construction of beautiful Solo Techno Park. So, when viewed from the aspect of its implementation by looking at some factors that affect the implementation of the policy as executor attitude, communication, resources, and compliance and responsiveness target group, then the relocation policy has been effective. Meanwhile, if the views of the two other indicators, such as efficiency and satisfaction of target groups say the policy has not been effective because it does not achieve efficiency and the public street vendors are not satisfied with the results of policy. That's because the existing policy, can not provide solutions or solve problems related to improving the economic welfare of the street vendors are now referred to the merchant market.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan pertambahan angkatan kerja di kota yaitu sebagai akibat imigrasi desa-kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota. (dalam Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, 1995:87)

Di daerah perkotaan, sektor informal dianggap mengundang banyak masalah terutama mereka yang beroperasi di tempat strategis di kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan kota dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup kota. Oleh karena itu, pemerintah kota (Pemkot) telah mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota. Contohnya mereka diusir dari tempat mereka berusaha atau alat untuk usaha mereka disita.

Terlepas dari permasalahan tersebut, sesungguhnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran

yang berada di kota besar. Hal itu dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk hidup di kota besar dan bukan menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan.

Menurut Sethuraman yang dikutip Chriss Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (1995:87), berdasarkan survei yang dilakukan di kota-kota Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia, didapatkan bahwa kira-kira 20-70% kesempatan kerja terdapat dalam kegiatan kecil-kecilan yang disebut sektor informal. Yang dimaksud dengan sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak terorganisasikan dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Sektor informal di bidang ekonomi berperan serta dalam menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal. Termasuk sektor informal misalnya Pedagang Kaki Lima (PKL). (dalam Daldjoeni, 1998:224)

Pemerintah menganggap PKL adalah sampah masyarakat yang harus dibersihkan. Hal itu biasanya dilakukan dengan pengusuran. Alasan pemerintah melakukan pengusuran biasanya untuk ketertiban dan kebersihan. Bahkan di beberapa kota besar sampai terjadi penganiayaan dan tindakan yang kurang pantas dari pihak pemerintah terhadap PKL.

Hal itu memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia terlalu meniru gaya ekonomi dari negara-negara maju dan lupa meniru esensi cara negara maju mengatur ekonominya. Maksudnya adalah pemerintah kita hanya peduli terhadap penampilan ekonomi secara kasat mata (banyaknya gedung-gedung pencakar langit, *mall* di mana-mana, perumahan-perumahan elit dan gaya

hidup bangsanya yang konsumtif). Akan tetapi, tidak tanggap terhadap kualitas kesejahteraan bangsa dan negaranya.

Pemerintah lupa bahwa Ia telah membuat rakyatnya sengsara tanpa penghidupan yang layak dengan cara mengusir para PKL. Padahal dengan melakukan pengusuran terhadap PKL malah membuat bangsa ini terpuruk secara ekonomi dan pengangguran semakin meningkat. Kalaupun alasannya untuk kebersihan dan ketertiban, pemerintah seharusnya berupaya untuk merapikan bangunan kayu-kayu itu dengan bangunan yang pantas serta para PKL diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Kejadian-kejadian tersebut merupakan suatu bukti bahwa keberadaan PKL di negeri ini selalu menjadi masalah. Permasalahan itu muncul karena meningkatnya jumlah PKL yang tidak diimbangi dengan penataan lokasi yang baik. Keberadaan PKL dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya membuat keruwetan, sehingga terkesan kumuh dan mengganggu kenyamanan publik.

Seperti halnya yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia, Kota Surakarta atau sering disebut Kota Solo, Jawa Tengah, juga memiliki permasalahan tersendiri dengan adanya PKL. Joko Widodo, selaku Walikota Solo, mengungkapkan bahwa jumlah PKL di Solo yang belum tertata saat ini berjumlah 38 persen dari sekitar 5.817 PKL yang ada. Banyaknya PKL yang berdagang secara sembarangan mengganggu ketertiban Solo sehingga menghambat pertumbuhan kota ke arah positif. (dalam www.lifestyle.id.finroll.com)

Oleh karena itu, Pemkot Surakarta menjadikan penataan PKL sebagai permasalahan serius yang perlu dilakukan dengan pendekatan tersendiri secara lebih intensif. Saat ini Pemkot Surakarta juga sedang melakukan pendekatan kepada kalangan PKL yang belum tertata tersebut yaitu dengan pendekatan memanusiakan PKL. Pendekatan itu dilakukan dengan diskusi tentang idealnya sebuah penataan PKL yang dilakukan sambil makan bersama dengan kalangan PKL.

PKL di Kota Surakarta tersebar di lima kecamatan. Bahkan berdasarkan pendataan dari masing-masing kecamatan, ada ribuan PKL yang tersebar dan mengandalkan ekonomi keluarganya dari profesi tersebut. Misalnya saja, PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. (dalam quilljournal.wordpress.com)

Keberadaan PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara berawal sejak tahun 1990-an. Hingga kini jumlahnya berkisar 400-an. Para PKL tersebut kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK) pada tahun 2000. Ketua PPSK periode 2006-2009, Sukir Atmo Wiyono mengatakan bahwa keberadaan PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara semakin bertambah hingga mencapai sekitar 400-an PKL. (dalam quilljournal.wordpress.com)

Adapun penataan PKL selalu menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju, melihat PKL sebagai penggerak perekonomian kota dan sebagai upaya untuk menyerap lapangan pekerjaan serta menyediakan barang atau makanan murah dan mudah dijangkau masyarakat. Di sisi lain, PKL dipandang sebagai

penyakit kota. Keberadaan mereka di fasilitas umum dan fasilitas sosial dinilai merusak estetika kota.

Kesan semrawut yang ditimbulkan memang tidak sedap dipandang. Apalagi mereka menempati lahan-lahan kosong di sekeliling kampus secara ilegal. PKL seringkali juga mengganggu ketertiban, karena pembeli kendaraan yang datang biasanya memarkirkan kendaraannya di badan jalan akibat keterbatasan tempat. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara, terutama yang di sekitar Kampus UNS membidik mahasiswa sebagai pangsa pasar terbesar. Bagi mahasiswa, keberadaan PKL sangat menguntungkan, karena PKL tersebut menawarkan pemenuhan *basic needs* seperti makan, minum, dengan harga yang relatif murah dan mudah diakses dari titik-titik aktivitas mahasiswa yaitu kampus dan *kost*. Aksesibilitas dan harga ini menjadi dua kunci penting yang menjadikan PKL tetap dibutuhkan dan dicari oleh mahasiswa.

Meskipun PKL membawa dampak positif bagi mahasiswa namun penataan PKL harus tetap dilakukan. Terlebih dengan adanya kebijakan pembangunan *Solo Techno Park* yang terletak di belakang Kampus Ketingan UNS, maka PKL di sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara harus direlokasi karena PKL dianggap telah mempersempit jalan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan,

kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha. Perda tersebut merupakan dasar untuk merelokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yaitu dari Kecamatan Jebres ke Barat sampai Pedaringan. Selanjutnya, PKL-PKL tersebut akan dipindah ke tempat yang telah disediakan di belakang Kantor Kecamatan Jebres yaitu di Pasar Panggungrejo.

Relokasi PKL tersebut direncanakan untuk sekitar 160-an PKL. Jadi, sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara atau dari Kecamatan Jebres ke Barat sampai Pedaringan akan dipindah ke Pasar Panggungrejo. Tujuan dari penataan PKL itu adalah menciptakan kawasan bebas PKL di dekat kampus dan kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya *Techno Park*.

Bangunan yang disediakan untuk PKL belum dimanfaatkan secara efektif. Tidak semua PKL menempati tempat baru yang sudah disediakan di Pasar Panggungrejo, sehingga pemindahan tersebut semakin menurunkan peluang dan pendapatan PKL. Penurunan pendapatan tersebut mengakibatkan banyak dari PKL mencoba kembali ke belakang Kampus Ketingan UNS.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka melalui penelitian ini mencoba mengetahui bagaimanakah efektivitas kebijakan relokasi PKL. Adapun penelitian yang akan diambil yaitu di Pasar Panggungrejo yang menjadi tempat dimana PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara ditempatkan setelah direlokasi. Dimana pasar tersebut terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh gambaran tentang pelaksanaan program relokasi tersebut dan

efektivitas kebijakan relokasi PKL itu serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan maka perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi Administrasi Negara khususnya Kebijakan Publik serta dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini nanti akan berpengaruh pada semakin membaiknya pengelolaan PKL yang sesuai dengan tujuan utama dilaksanakannya relokasi oleh Pemkot. Selain itu juga diharapkan dengan kebijakan relokasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para PKL.

3. Manfaat individual

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh Peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

Efektivitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Sedangkan R. Ferry Anggoro Suryokusumo (2008:14) menjelaskan efektivitas secara sederhana yaitu dapat diartikan "tepat sasaran", yang juga lebih diarahkan pada aspek kebijakan, artinya program-program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan yang akan dicapai.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya efektivitas adalah suatu penyelesaian pekerjaan yang benar dan tepat

waktu hingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Alasan pemilihan kriteria ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Setelah mengetahui tentang efektivitas, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian kebijakan. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Definisi ini sangat umum dan karena itu dalam beberapa hal perlu dipertegas dan dikoreksi. Sedangkan James Anderson menjelaskan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Budi Winarno, 2007:17-18) Dalam hal ini, kebijakan adalah menyangkut keduanya, keputusan dan tindakan.

Sementara itu, Carl Friedrich dalam Wahab (2004:3) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari definisi-definisi efektivitas dan kebijakan di atas, dapat disimpulkan pengertian dari efektivitas kebijakan yaitu suatu konsep untuk mengukur tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Dimana kebijakan tersebut merupakan keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Pemkot Solo dalam hal menangani masalah PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara.

Adapun Henry, Brian dan White (dalam Samodra W., 1994:65) mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan yaitu:

- a) Waktu pencapaian
- b) Tingkat pengaruh yang diinginkan.
- c) Perubahan perilaku masyarakat.
- d) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.
- e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

Suatu program yang tidak mengarah pada kriteria-kriteria tersebut dipandang tidak efektif. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

Adapun menurut Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) kegiatan akan memenuhi keberhasilan bila memenuhi lima kriteria, yaitu:

a) Pencapaian tujuan atau hasil

Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. Hal ini karena pada prinsipnya suatu kebijakan atau suatu program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tanpa adanya hasil yang dapat diukur, dirasakan, maupun dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat, maka program tersebut tidak ada artinya.

b) Efisiensi

Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak program pemerintah secara faktual mampu terimplementasikan (ada hasil). Akan tetapi, dari segi waktu anggaran maupun kualitasnya jauh dari apa yang direncanakan. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan terimplementasikan dengan baik, apabila ada

perbandingan terbaik antara kualitas program dengan biaya, waktu dan tenaga yang ada.

c) Kepuasan kelompok sasaran

Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

d) Daya tanggap *client*

Dengan adanya daya tanggap yang positif dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan peran serta mereka pada kebijakan yang ada akan meningkat. Mereka akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksanaan. Ini berarti kebijakan tersebut semakin mudah diimplementasikan.

e) Sistem pemeliharaan

Dalam hal ini pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar.

Apabila efektivitas kebijakan tercapai maka kebijakan tersebut dianggap telah berhasil dalam menangani permasalahan yang ada. Dalam hal ini berarti kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang dibuat oleh Pemkot Solo dianggap efektif jika kebijakan tersebut berhasil dalam menangani permasalahan yang muncul akibat adanya PKL, seperti kesan semrawut serta mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Selain itu, kebijakan dikatakan efektif ketika kebijakan tersebut mampu memberikan solusi bagi permasalahan kesejahteraan ekonomi para PKL, yaitu dengan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan atau Program

Pada dasarnya efektivitas untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan relokasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:273), faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi adalah sesuatu hal yang mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan serta hasil yang ada setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL tersebut dapat dilihat dari beberapa model implementasi kebijakan seperti di bawah ini:

a. Model dari Grindle

Grindle dalam buku Wibawa (1994:22) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh 2 variabel utama yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.

BAGAN L1

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT GRINDLE



Keterangan :

1) Isi Kebijakan Mencakup

a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Suatu kebijakan sebaiknya mampu secara optimal menampung kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak dari suatu kebijakan tersebut. Semakin optimal suatu kebijakan dalam menampung kepentingan banyak pihak maka semakin sedikit pihak yang menentang kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

b) Jenis manfaat yang dihasilkan

Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan manfaat yang besar dan jelas manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut maka semakin besar dukungan terhadap kebijakan tersebut untuk segera diimplementasikan.

c) Derajat perubahan yang diinginkan

Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan perubahan ke arah kemajuan secara nyata dan rasional. Suatu kebijakan yang terlalu menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran akan lebih sulit untuk diimplementasikan.

d) Kedudukan pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan yang mempunyai wewenang (otoritas) yang tinggi dapat dengan mudah mengkoordinasikan bawahannya

didukung oleh komunikasi yang baik sehingga kedudukan pembuat kebijakan dapat mempengaruhi proses implementasinya.

e) Pelaksanaan program

Pelaksana program harus mempunyai kualitas pemahaman yang baik mengenai kondisi lapangan dan tugas yang harus dijalannya. Koordinasi haruslah baik supaya program berjalan efektif dan lancar.

f) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang dimaksud adalah semua komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan program seperti keuangan, administrasi dan sebagainya.

2) Konteks Kebijakan mencakup

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Banyaknya aktor dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non pemerintahan yang memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin saja berbeda berpengaruh terhadap pengimplementasian suatu kebijakan.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Apa yang diimplementasikan sebenarnya adalah hasil dari perhitungan berbagai kelompok yang berkompetisi memperebutkan sumber daya yang terbatas, yang semua interaksi tersebut terjadi dalam konteks suatu lembaga.

c) Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran

Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

b. Model dari Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994:19-21) mengemukakan 6 variabel yang memperlihatkan hubungan yang mempengaruhi kinerja atau hasil suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah :

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret sehingga kita bisa mengukur sejauh mana telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat keberhasilannya.

2) Sumber daya

Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana maupun insentif yang lain yang kemungkinan dapat mendorong terlaksananya implementasi secara efektif.

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguahan Aktivitas

Suatu kebijakan agar berhasil dalam implementasinya haruslah tercipta suatu komunikasi yang baik (terpadu) antar organisasi pelaksana serta adanya penetapan (penguahan) dan kejelasan dari serangkaian tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

4) Karakteristik Birokrasi Pelaksana

Karakteristik yang bisa disebut antara lain kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan serta kebebasan komunikasi dan keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan.

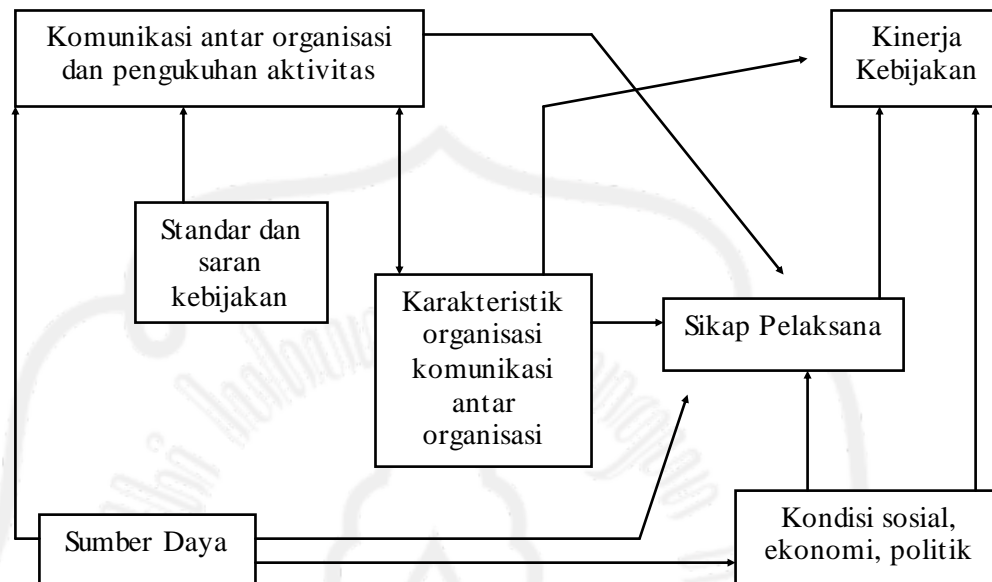
5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan, misalnya: apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki mendukung keberhasilan implementasi? Bagaimana keadaan sosial ekonomi dari masyarakat yang dipengaruhi kebijakan?

6) Sikap Pelaksana

Sikap individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respon mereka terhadap keterkaitan antar variabel tersebut. Wujud respon pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.

BAGAN I.2
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT VAN
METER DAN VAN HORN



c. Model dari Mazmanian dan Sabatier

Kerangka berpikir mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan milik Van Meter dan Van Horn serta Grindle. Dalam hal perhatiannya terhadap dua persoalan mendasar (kebijakan dan lingkungan kebijakan). Hanya saja pemikiran Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan teknis). Model ini sering disebut sebagai model *top down* (pendekatan dari atas ke bawah).

Mazmanian dan Sabatier dalam buku Wibawa (1994:25) menyatakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu :

1) Karakteristik masalah

Dalam implementasi program akan dijumpai karakteristik masalah yang bisa terdiri dari empat variabel yaitu bagaimana ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat dari populasi dan derajat perubahan.

2) Daya dukung peraturan

Implementasi akan efektif bila pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan yang ditetapkan. Aturan-aturan yang disarankan yaitu kejelasan atau konsistensi tujuan yang merupakan standar evaluasi dan saran bagi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan, integrasi organisasi pelaksana, direksi pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana dan akses formal pelaksana keorganisasian lain sebagai suatu bentuk koordinasi.

3) Variable non Pemerintah

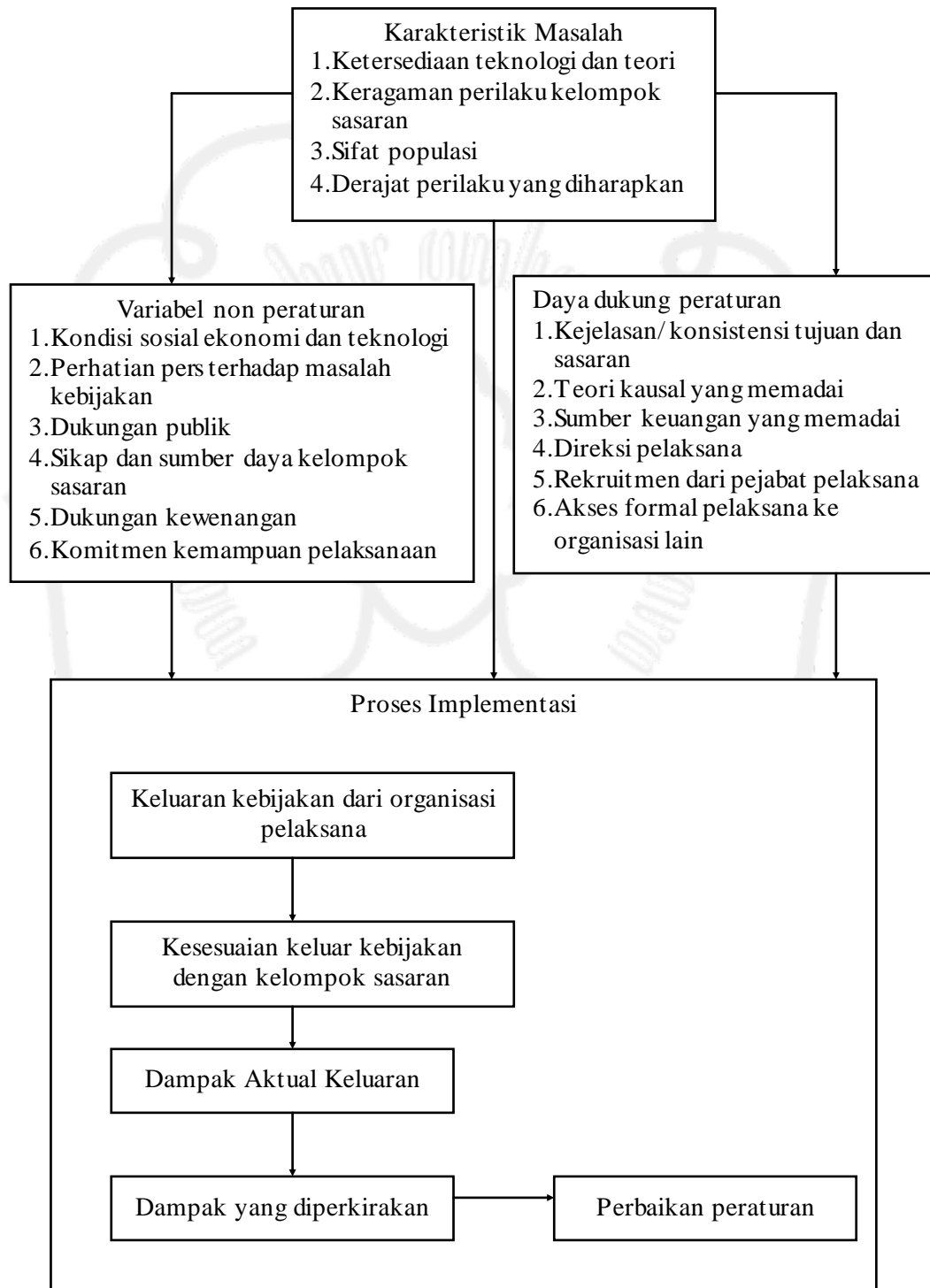
Dalam implementasi juga memerlukan variabel lain di luar peraturan seperti kondisi sosio ekonomi dan teknologi,

perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap sumber daya kelompok sasaran, dukungan kewenangan serta komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Adapun model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



BAGAN I.3
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT MAZMANIAN DAN
SABATIER



Dalam pelaksanaan suatu program ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Komponen-komponen yang ada merupakan hasil pemilihan dari pendapat atau model dari para ahli. Komponen-komponen yang ada tidak secara otomatis berlaku secara bulat dan utuh artinya ada suatu faktor yang dikemukakan sebagai kesatuan, adakalanya dipisah dan diadaptasikan dengan kondisi lapangan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, komponen-komponen yang digunakan dan sekaligus sebagai faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL adalah sebagai berikut:

1. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Dukungan sikap pelaksana program meliputi keahlian, keaktifan, kreatifitas serta dedikasi pelaksana yang berpengaruh selama proses pelaksanaan serta kekuasaan, kepentingan dan strategi aparat yang terlibat proses pelaksanaan. Sikap pelaksana yang mendukung program akan menimbulkan kreativitas agar pelaksanaan lebih efektif. Sikap ini ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan program. Seringkali terjadi sikap pelaksana berubah karena mempunyai kepentingan atau pengaruh lain dari luar.

2. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program, terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan koordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antara aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan.

Secara garis besar komunikasi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua yakni komunikasi mendatar dan komunikasi vertikal. Komunikasi mendatar terjadi antar aparat yang berkedudukan sejajar untuk mengkoordinasikan tugas dan peranan agar tidak terjadi *overlapping* tugas-tugas atau kekosongan perhatian terhadap sesuatu. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan yang bisa berwujud perintah, informasi, teguran dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

3. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier)

Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanaan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, perlengkapan yang dibutuhkan maupun Sumber Daya Manusianya.

4. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model Implementasi Mazmanian dan Sabatier)

Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

3. Relokasi

Relokasi merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih baik. Relokasi PKL merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Surakarta dalam melakukan penataan, pengelolaan dan pembinaan PKL dengan menyediakan tempat baru yang lebih baik, jadi tidak hanya sekedar penertiban.

Mustafa (2008:23) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang menertibkan tempat aktivitas atau kegiatan usaha dengan disertai biaya dan syarat-syarat administratif dapat dipandang sebagai pengakuan PKL sebagai profesi yang legal dan formal sebagaimana sektor formal pada umumnya. Sehingga relokasi tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan peranan sektor informal dalam menunjang perekonomian.

4. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu sektor informal

Jumlah penduduk perkotaan mempunyai kecenderungan yang semakin besar. Pemusatan kegiatan di kota memiliki daya tarik yang besar bagi penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi merupakan respon terhadap harapan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang dianggap lebih baik.

Perkembangan kota yang semakin terspesialisasi dengan kemajuan industri menuntut kemampuan dan keterampilan para migran yang memadai. Ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan tersebut menyebabkan mereka bekerja pada sektor informal. Hal ini mengakibatkan para pendatang banyak yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak di kota. Tadjudin Noer Effendi (1995:93) menyebutkan bahwa para pendatang di kota banyak yang mengerjakan pekerjaan apa saja asal bisa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang terbatas dan ketiadaan keterampilan personal tersebut mengakibatkan pesatnya pertumbuhan sektor informal di kota-kota. Yang dimaksud dengan sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak terorganisasikan dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Sektor informal di bidang ekonomi berperan serta dalam menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal. Termasuk sektor informal adalah PKL. (Daldjoeni, 1998:224)

Pesatnya perkembangan sektor informal terutama PKL ini selayaknya mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah.

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Perda Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan PKL adalah setiap orang yang melakukan usaha dagang maupun jasa di tanah milik negara. Berdasarkan definisi tersebut, semua PKL yang menempati area publik atau tanah-tanah milik pemerintah adalah ilegal, tak terkecuali PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. Hal itu bukan diartikan bahwa PKL harus dihilangkan dari daftar perekonomian masyarakat. Akan tetapi, PKL diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam membangun pilar-pilar perekonomian masyarakat. (dalam quilljournal.wordpress.com) PKL merupakan usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

John C. Cross, Ph.D menjelaskan bahwa salah satu usaha dalam sektor ekonomi informal adalah PKL.

“Street vending usually falls within the category of informal economic activity. This category includes “the production and exchange of legal goods and services that involves the lack of appropriate business permits, violation of zoning codes, failure to report tax liability, non-compliance with labor regulations governing contracts and work conditions, and/or the lack of legal guarantees in relations with suppliers and clients (Cross 1999: 580).” (Street Vendors, Modernity and Postmodernity: Conflict and Compromise in The Global Economy. Vol.20 No.1 hal

37-38) ("Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya termasuk dalam kategori kegiatan ekonomi informal. Kategori ini mencakup "produksi dan pertukaran barang-barang legal dan jasa servis dimana usaha tersebut termasuk dalam usaha dengan kurangnya izin usaha yang tepat, pelanggaran kode zonasi, kegagalan untuk melaporkan kewajiban pajak, tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang mengatur kontrak dan kondisi kerja, dan/ atau kekurangan jaminan hukum dalam hubungan dengan pemasok dan klien." (Cross 1999: 580). (PKL, Modernitas dan Postmodernitas: Konflik dan Kompromi dalam Ekonomi Global. Vol.20 No.1 Hal 37-38))

Sedangkan Kartini Kartono, dkk mendefinisikan PKL sebagai berikut:

- a. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa PKL berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal.
- b. PKL memberi pengertian bahwa mereka pada umumnya menjual barang-barang dagangan pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis.
- c. PKL pada umumnya memperdagangkan makanan, minuman dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran.
- d. Para PKL pada umumnya bermodal kecil bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi.
- e. Pada umumnya kuantitas barang yang dipergunakan oleh PKL relatif rendah.
- f. Kualitas barang dagangan para PKL relatif tidak seberapa.
- g. Kasus dimana para PKL bekerja secara ekonomis sehingga yang dapat menaiki tangga dalam jenjang perdagangan yang sukses agak langka.
- h. Pada umumnya usaha para PKL merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga.
- i. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam PKL.
- j. Ada PKL yang melaksanakan usaha secara musiman dan sering terlihat jenis barang dagang berganti-ganti.
- k. Mengingat sektor kepentingan maka pertentangan antara kelompok PKL adalah hal yang biasa. PKL di sini merupakan kelompok yang sulit bersatu dalam bidang

ekonomi walaupun perasaan setia kawan cukup kuat di antara mereka. (Kartini Kartono, 1984:15)

Definisi-definisi tentang PKL di atas menunjukkan bahwa siapa saja berpeluang untuk menjadi PKL. Kemudahan ini mendorong pesatnya jumlah PKL di kota-kota. Usaha ini cukup menjanjikan bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal, serta bagi mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan.

Ray Bromley mendefinisikan PKL sebagai berikut:

“Street vending is an ancient and important occupation found in virtually every country and major city around the world. Street vendors add vitality to the streetscape and contribute to economic activity and service provision, but many observers also associate them with congestion, health and safety risks, tax evasion and the sale of shoddy merchandise. Numerous national laws, local laws and municipal ordinances apply to street vending or are specifically targeted at street vendors, and most countries have a long history of regulating their activity.” (Street vending and public policy: a global Review I International Journal. Vol.20 no.1 hal: 1) “Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pekerjaan lama dan penting yang ditemukan hampir setiap negara dan kota besar di seluruh dunia. PKL menambahkan vitalitas untuk pedagang pinggir jalan dan berkontribusi untuk kegiatan ekonomi dan penyediaan jasa, tapi banyak pengamat juga mengasosiasikan mereka dengan kemacetan, kesehatan dan risiko keamanan, penggelapan pajak dan penjualan barang dagangan buruk. Sejumlah undang-undang nasional, hukum lokal dan tata kota berlaku untuk PKL atau yang secara khusus ditujukan pada PKL, dan sebagian besar negara memiliki sejarah panjang mengatur kegiatan mereka.” (PKL dan kebijakan publik: Suatu Resensi Gobar I Jurnal Internasional. Vol.20 No.1 Hal: 1)

PKL adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit, berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Keberadaan PKL sering menjadikan sebuah problematika yang besar, sebab jika tidak mampu diatur dengan baik maka keberadaan PKL yang kebanyakan menempati ruang-ruang publik akan sangat mengganggu. Meskipun keberadaannya menjadikan diskusi yang panjang namun pada kenyatannya sektor informal ini mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perekonomian.

Mustafa (2008:9) menyatakan bahwa jenis usaha sektor ini paling berpengaruh karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah ke bawah.

b. Penataan tempat usaha PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Kegiatan penataan tempat usaha merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan PKL. Dalam penataan tempat usaha tersebut walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan

memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Adapun program-program penataan PKL yang telah dilakukan pemerintah adalah relokasi yang meliputi bedol deso dan dimasukkan ke pasar-pasar tradisional, shelterisasi, gerobak seragam, tenda, payungisasi, serta kiosisasi.

Dalam penataan PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pemkot Surakarta menggunakan pendekatan lewat dialog. Sebelum direlokasi, para pedagang diajak untuk berdialog. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi hasilnya PKL mau direlokasi dengan kesepakatan yang dicapai selama dialog yang berlangsung antara pemerintah dengan PKL.

Relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, relokasi PKL bagian utara kampus UNS melalui kiosisasi. Namun, banyak yang kembali ke belakang kampus sebelah selatan. Tahap kedua juga dilakukan relokasi melalui kiosisasi. Kios tersebut disediakan di belakang Kantor Kecamatan Jebres (Pasar Panggungrejo). Apabila mereka tidak menempati kios dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka mereka akan kehilangan hak untuk menempatnya.

5. Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL

Pada dasarnya efektivitas kebijakan relokasi PKL merupakan suatu konsep untuk mengukur tercapainya tujuan dari kebijakan relokasi PKL

baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Adapun tujuan dari kebijakan relokasi PKL itu sendiri menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah ingin mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan Indah.

Untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan dapat dilihat dari bagaimanakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila program tersebut diimplementasikan kemudian tujuan kebijakan tercapai, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu.

Tak cukup hanya melihat dari pencapaian tujuannya saja, efektivitas kebijakan tersebut juga dilihat dari indikator hasil yang dapat diambil dari pendapat Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) sebagai berikut:

a) Pencapaian tujuan atau hasil

Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan,

maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. Hal ini karena pada prinsipnya suatu kebijakan atau suatu program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tanpa adanya hasil yang dapat diukur, dirasakan, maupun dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat, maka program tersebut tidak ada artinya.

b) Efisiensi

Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak program pemerintah secara faktual mampu terimplementasikan (ada hasil). Akan tetapi, dari segi waktu anggaran maupun kualitasnya jauh dari apa yang direncanakan. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan terimplementasikan dengan baik, apabila ada perbandingan terbaik antara kualitas program dengan biaya, waktu dan tenaga yang ada.

c) Kepuasan kelompok sasaran

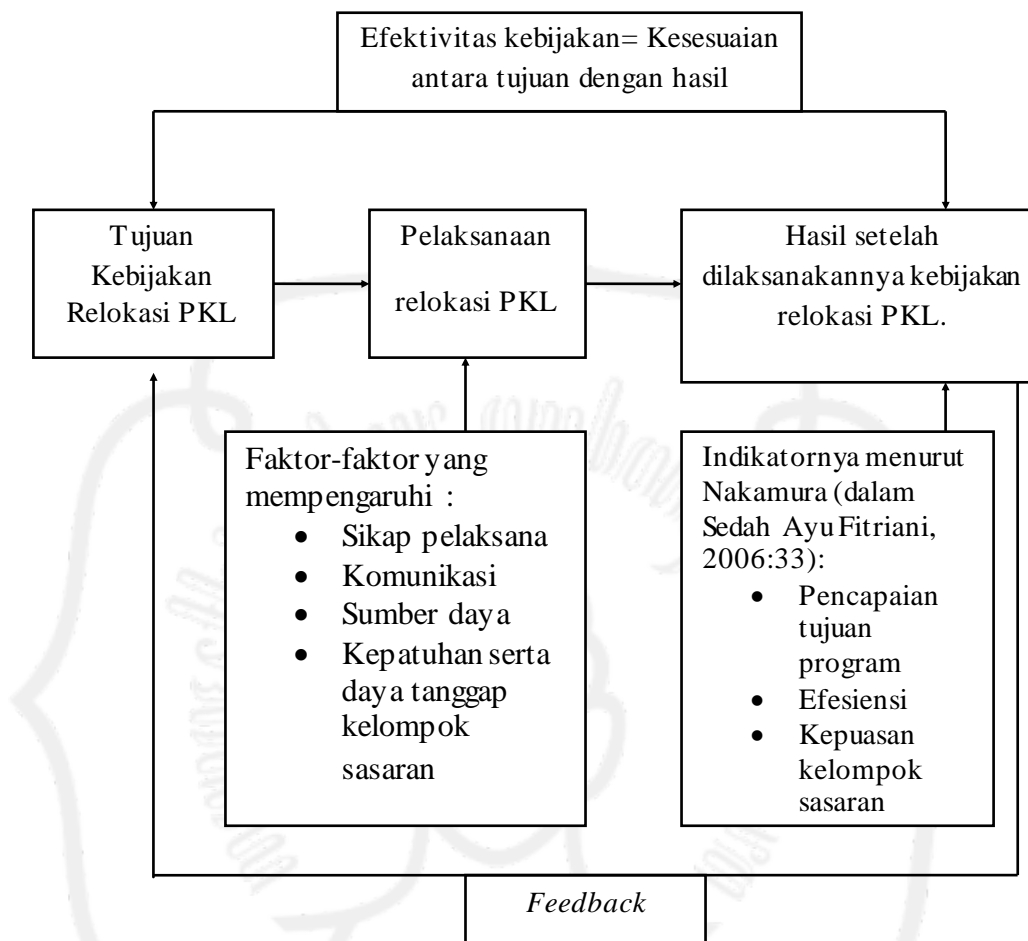
Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam

mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

Pemilihan indikator hasil di atas didasarkan pada alasan bahwa indikator tersebut merupakan pengukur yang tepat dari efektivitas kebijakan apabila dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan.



B. Kerangka Pemikiran



PKL merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan. Keberadaan PKL dianggap telah mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Begitu pula dengan PKL yang berada di kota Solo, khususnya di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di satu sisi PKL sangat membantu para mahasiswa serta masyarakat sekitar untuk memenuhi beberapa kebutuhan penting seperti makan, minum serta beberapa kebutuhan lain yang disediakan oleh para PKL.

Di sisi lain, PKL dipandang sebagai penyakit kota. Keberadaan mereka di fasilitas umum dan fasilitas sosial dinilai merusak estetika kota. Kesan semrawut yang ditimbulkan memang tidak sedap dipandang. Apalagi mereka menempati lahan-lahan kosong di sekeliling kampus secara ilegal. PKL seringkali juga mengganggu ketertiban, karena pembeli kendaraan yang datang biasanya memarkirkan kendaraannya di badan jalan akibat keterbatasan tempat. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, menegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha. (dalam quilljournal.wordpress.com) Akan tetapi, kenyataannya memperlihatkan bahwa PKL malah mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Oleh karena itu, Pemkot Solo berupaya menertibkan PKL khususnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara melalui kebijakan relokasi PKL. Dengan kebijakan itu maka PKL di sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara direlokasi dan kemudian dipindahkan untuk menempati kios-kios yang telah disediakan oleh Pemkot Solo yaitu di Pasar Panggunrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres.

Setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi dengan dikosongkannya lahan yang tadinya ditempati PKL, nyatanya masih terdapat beberapa PKL yang mencoba kembali ke tempat semula dan mereka malah tidak menempati kios-kios di Pasar Panggunrejo yang telah disediakan oleh Pemkot itu. Adapun kios-kios yang ditempati para PKL tersebut nampak masih sepi, belum ramai oleh

pelanggan. Untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan dapat dilihat dari bagaimanakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila program tersebut diimplementasikan kemudian tujuan kebijakan tercapai, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL tersebut dapat dilihat dari beberapa komponen yang ada dalam model implementasi kebijakan. Dimana komponen-komponen yang digunakan dan sekaligus sebagai faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL adalah sebagai berikut:

1. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Dukungan sikap pelaksana program meliputi keahlian, keaktifan, kreativitas serta dedikasi pelaksana yang berpengaruh selama proses pelaksanaan serta kekuasaan, kepentingan dan strategi aparat yang terlibat proses pelaksanaan. Sikap pelaksana yang mendukung program akan menimbulkan kreativitas agar pelaksanaan lebih efektif. Sikap ini ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan program. Seringkali terjadi sikap pelaksana berubah karena mempunyai kepentingan atau pengaruh lain dari luar.

2. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program, terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan koordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antara aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan.

Secara garis besar komunikasi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua yakni komunikasi mendatar dan komunikasi vertikal. Komunikasi mendatar terjadi antar aparat yang berkedudukan sejajar untuk mengkoordinasikan tugas dan peranan agar tidak terjadi *overlapping* tugas-tugas atau kekosongan perhatian terhadap sesuatu. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan yang bisa berwujud perintah, informasi, teguran dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

3. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier)

Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanaan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, perlengkapan yang dibutuhkan maupun Sumber Daya Manusianya.

4. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model Implementasi Mazmanian dan Sabatier)

Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

Efektivitas kebijakan tak cukup hanya dilihat dari pencapaian tujuannya saja, tetapi juga dilihat dari indikator hasil yang dapat diambil dari pendapat Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) sebagai berikut:

a) Pencapaian tujuan atau hasil

Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. Hal ini karena pada prinsipnya suatu kebijakan atau suatu program dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tanpa adanya hasil yang dapat diukur, dirasakan, maupun dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat, maka program tersebut tidak ada artinya.

b) Efisiensi

Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak program pemerintah secara faktual mampu terimplementasikan (ada hasil). Akan tetapi, dari segi waktu anggaran maupun kualitasnya jauh dari apa yang direncanakan. Dengan demikian, suatu program dapat dikatakan terimplementasikan dengan baik, apabila ada perbandingan terbaik antara kualitas program dengan biaya, waktu dan tenaga yang ada.

c) Kepuasan kelompok sasaran

Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.

Pemilihan indikator hasil di atas didasarkan pada alasan bahwa indikator tersebut merupakan pengukur yang tepat dari efektivitas kebijakan apabila dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan. Dengan demikian efektivitas kebijakan tercipta ketika tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai serta kebijakan tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Dalam hal ini efektivitas kebijakan tercapai ketika tujuan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara tercapai, yaitu menciptakan kawasan bebas PKL dan kawasan asri sehubungan dibangunnya Solo *Techno Park*. Selain itu juga, kebijakan

tersebut mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dilanda PKL yaitu masalah kesejahteraan ekonomi para PKL. Dimana diharapkan dengan dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi PKL.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab metodologi penelitian ikut menunjang proses penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong (2002:3) mendefinisikan, "Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati."

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan, "Penelitian kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya."

Menurut H.B. Sutopo (2002:35) penelitian kualitatif melibatkan kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti berusaha menganalisa data dengan semua kekayaan wataknya yang penuh nuansa, sedekat mungkin dengan bentuk aslinya seperti waktu dicatat.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, khususnya di lokasi yang kini ditempati PKL yaitu di Pasar Panggunrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta.

Pemilihan Pasar Panggunrejo sebagai lokasi penelitian yaitu karena isu tentang relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara memang sedang hangat dibicarakan dengan fakta yang ada yaitu hanya beberapa PKL saja yang menempati kios-kios di Pasar Panggunrejo yang dibangun pemerintah di belakang Kantor Kecamatan Jebres.

Selain itu juga gejolak-gejolak (permasalahan) yang muncul dalam proses pelaksanaan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara menjadi hal yang menarik untuk diketahui lebih lanjut dengan diadakannya penelitian di lokasi tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang memaparkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada. Penelitian deskriptif menurut Sutopo (2002 : 111) yakni studi kasus yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Selain itu, penelitian ini juga ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mengetahui relevansi pengetahuan yang ditemukan di lapangan dengan pendekatan teori yang ada.

3. Sumber data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Akan tetapi, demi kelengkapan dan kebutuhan dari masalah yang diteliti maka akan dikumpulkan pula data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan yang akan diwawancarai antara lain:
 - a. Pedagang Kaki Lima di Jalan Ki Hajar Dewantara yang sudah pindah di tempat kios PKL yang baru yakni di Pasar Panggunrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta.
 - b. Kepala Pasar Panggunrejo.
 - c. Aparat Kantor Pengelolaan PKL, yaitu Kepala Dinas Bidang Pengelolaan PKL serta beberapa kasie pada Kantor Bidang.
 - d. Pihak UNS, yaitu Bagian Perencanaan dan Pembangunan dan beberapa pihak yang terkait.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, yang biasanya terbentuk publikasi-publikasi. Yaitu melalui catatan-catatan

lapangan hasil observasi penelitian dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-deph interviewing*) yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan dengan pertanyaan yang bersifat *openended* dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. (Sutopo, 2002:59)

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda; serta rekaman gambar, yaitu suatu lokasi dan benda serta rekaman gambar yang menyangkut relokasi di belakang Kampus Ketingan UNS Surakarta. (Sutopo, 2002:64)

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data yang ada di lapangan maupun yang tersimpan di

kantor berupa catatan, literatur, arsip, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PKL yang terkena dampak relokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara.

b. Satuan Kajian (*Unit of Analysis*)

Satuan kajian merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini maka satuan kajiannya adalah beberapa PKL yang kini menempati Pasar Panggungrejo.

c. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan Peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiyono, 2006:91)

Informan sebagai sampel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu pertama, aparat pelaksana yang menjadi perencana atas terealisasinya kebijakan relokasi tersebut dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar khususnya pada Bidang Pengelolaan PKL. Kedua, kelompok sasaran kebijakan, yaitu individu atau kelompok yang terkena kebijakan, dalam hal ini adalah PKL yang kini menempati Pasar Panggungrejo.

6. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Artinya, peneliti memilih informan yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui permasalahan secara mendetail.

7. Validitas Data

Validitas menguji keabsahan data yang diperoleh, Peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Lexy J. Moleong, 2000:178) Menurut Patton dalam Sutopo (2002:79-82) triangulasi dibagi menjadi empat, yakni;

- a) Triangulasi sumber, yakni mengarah pada memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis

sebagai pembanding agar dapat teruji kemantapan dan kebenarannya.

- b) Triangulasi metode, yakni dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda dan kemudian hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya.
- c) Triangulasi peneliti, adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa penelitian yang lain.
- d) Triangulasi teori yaitu melaksanakan penelitian dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori yang lain, misalnya teori budaya, sosial, politik dan ekonomi.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan digunakan teknik triangulasi sumber, yang memanfaatkan jenis sumber yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Di sini tekanannya pada perbedaan sumber data, yang bukan teknik pengumpulan data atau yang lain. Peneliti bisa memperoleh narasumber yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.

8. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moleong, 2004:103)

Tujuan dari menganalisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Sugiyono (2004:169) menjelaskan bahwa kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti dan melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Di dalam analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote* (HB Sutopo, 2002:91). HB Sutopo juga menambahkan bahwa reduksi data berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data (2002:91). HB Sutopo lebih lanjut menyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan (2002:92).

b) Sajian Data

Kegiatan kedua dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Iskandar (2009:141-142) menjelaskan bahwa biasanya dalam penelitian, Peneliti akan mendapat data yang banyak. Data yang didapat tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data, data dapat dianalisis oleh Peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

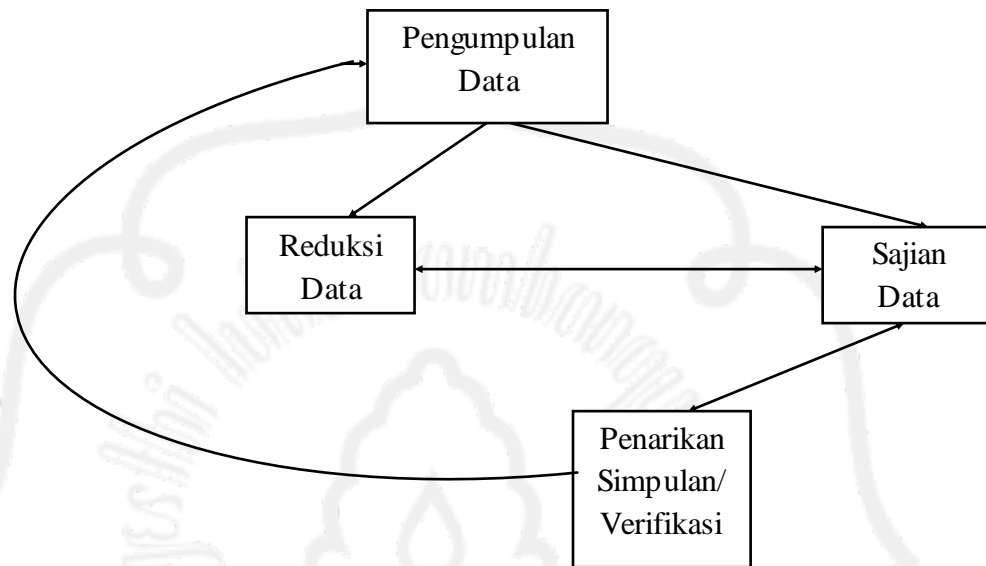
c) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Menarik simpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis yang ketiga. Iskandar (2009:142) menjelaskan bahwa mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan.

HB Sutopo (2002:93) menjelaskan bahwa simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat. HB Sutopo kemudian menegaskan bahwa pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya (2002:93). Iskandar menambahkan bahwa penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara

merefleksi kembali, Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

Untuk lebih jelasnya proses analisa data dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar I.5
Model Analisis Interaktif
(HB Sutopo, 2002:96)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan Kota Surakarta, maka perkembangan di sektor informal, dalam hal ini PKL pun juga meningkat pesat. Pada dasarnya, PKL berkembang pesat sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan memperbaiki keadaan akibat krisis moneter yang melanda saat itu. PKL membutuhkan modal yang pada umumnya tidak besar. Dengan alasan tersebut, berawal dari segelintir orang kemudian berkembang menjadi begitu banyak orang, bekerja sebagai PKL. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara sensus dapat diketahui jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah PKL di Kota Surakarta pada tahun 2007 sebanyak 3.917 PKL yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan Banjarsari terdapat 1.050 PKL (26,91%) dan di Kecamatan Jebres 1.172 PKL (29,92%).

Tabel II.1
Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah	%
1	Banjarsari	1.050	26,81
2	Jebres	1.172	29,92
3	Laweyan	697	17,79
4	Pasar Kliwon	617	15,75
5	Serengan	381	9,73
	Total	3.917	100

Sumber : Direktori Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Pesatnya pertumbuhan jumlah PKL tersebut tidak terlepas dari semakin pesatnya pertumbuhan kota. Semakin banyak tempat-tempat sebagai pusat keramaian maka tempat tersebut merupakan lahan yang berpotensi untuk berkembangnya PKL, seperti halnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Hal itu diungkapkan secara lebih jelas oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

"Maraknya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara disebabkan karena dekat dengan kampus. Dimana banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa mereka, seperti fotokopian, rental, makanan dan lain-lain. Jadi jika ada tempat yang ramai, di sana pasti ada PKL, jarang PKL jualan di tempat yang sepi, dimana tidak banyak orang yang berlalulalang."
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Berkembangnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara (khususnya belakang Kampus UNS) berawal sejak tahun 1990-an. Dengan keberadaan trotoar yang diperuntukkan bagi para pengguna jalan khususnya para mahasiswa, ternyata fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Entah karena alasan trotoar yang ada kurang nyaman ataupun alasan yang lain, trotoar yang sudah dibatasi dengan pagar besi pada sisi dalamnya yang berhubungan dengan lahan kampus, akhirnya pelan-pelan dilirik oleh para pelaku untuk mencoba berjualan, meski sudah ada larangan menggunakan trotoar untuk para PKL. (Perda PKL, 1995)

Gambar III.1 :
Trotoar terbengkalai yang memancing tumbuhnya PKL
Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 1996



Sumber: pipw.lppm.uns.ac.id

Keberadaan para PKL awalnya hanya sedikit dan hanya berjualan di malam hari dan barang dagangan yang dijual tidak selengkap sekarang. Pada waktu itu barang dagangan yang dijual hanya barang-barang kebutuhan para mahasiswa, sehingga secara tidak langsung antara para mahasiswa dengan PKL mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.

Lokasi pertama yang paling diminati para PKL adalah lokasi sekitar gerbang atau pintu masuk kampus, karena merupakan tempat arus sirkulasi masuk keluar para mahasiswa sehingga selain mudah dijangkau karena selalu dilewati, juga dianggap paling strategis dan bersih dibanding tempat yang lain. Adapun sarana yang digunakan oleh para PKL pada awalnya hanya warung tenda. Kalau dibutuhkan, warung dapat dibuka maupun ditutup setiap saat, karena dapat digulung dan dikemas dalam gerobak yang kemudian dititipkan kepada masyarakat terdekat.

Dengan adanya beberapa PKL sebagai embrio deretan PKL di lahan trotoar dan tidak adanya tindakan kepada mereka, pada tahap selanjutnya mulai bermunculan PKL-PKL baru yang semakin menambah panjang daftar

PKL di belakang Kampus Ketingan UNS ini. Dengan kondisi dan status yang sama-sama tidak jelas, mereka mulai saling memperebutkan lahan. Mereka merasa dapat memiliki lahan hanya dengan mematok lahan yang belum bertuan. Bahkan hanya dengan bermodalkan seutas tali rafia mereka dapat merasa memiliki *kapling*.

Setelah berjalan beberapa tahun, seiring dengan mulai bergulirnya reformasi yang menyusul badai krisis moneter, jumlah PKL semakin bertambah banyak yaitu sekitar tahun 1996 akhir. Senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

”Kondisi para PKL sudah mulai berkembang. Mereka mulai berani membangun warung semi permanen. Bentuk warungpun bervariasi sesuai dengan kemampuan modal masing-masing PKL. Bahan dinding terbuat dari bambu atau papan sedangkan atap pada umumnya menggunakan bahan seng. Demikian juga dengan luasan warungnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan komoditi yang mereka jual. Dengan kondisi seperti itu tidak jarang warung dimanfaatkan sekaligus untuk hunian.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Namun tidak semua PKL menjalankan usahanya dengan lancar. Oleh karena itu, ada beberapa PKL yang kemudian menutup usahanya. Parahnya lagi ketika mereka yang sudah tidak dapat meneruskan usahanya, mereka tidak mau membongkar kiosnya. Dengan demikian, mereka akan tetap merasa memiliki *kapling* yang setiap saat dapat dipakai atau dipindahtangankan ketika ada yang berminat untuk membeli atau menyewanya. Hal inilah yang kemudian menjadikan kepemilikan kios menjadi berantai dan bahkan tidak jelas.

Secara umum status kios PKL yang menempel di pagar belakang Kampus Ketingan UNS adalah milik sendiri dan menyewa (kontrak). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Pangungrejo berikut ini:

”Jadi yang dimaksud kios milik sendiri yaitu kios yang dibangun sendiri oleh PKL setelah mereka memperoleh lahan baik melalui cara membeli entah dari siapa maupun dengan cara mengapling sendiri lahan tersebut. Kemungkinan PKL tersebut membeli kios (bukan lahan) dari pemilik kios terdahulu. Sedangkan menyewa (mengontrak) kios dilakukan oleh PKL yang merasa enggan untuk membangun kios sendiri. Namun adakalanya PKL yang merasa memiliki lahan dan membangun kios di atasnya, enggan untuk menempati sendiri ataupun adanya kemungkinan spekulasi akan hasil yang diperoleh akan lebih besar ketika kios tersebut disewakan daripada bila ditempati sendiri.“
(Wawancara, 20 April 2010)

Sekitar awal Januari 2007 kondisi PKL di belakang Kampus Ketingan UNS mengalami perubahan yang sangat signifikan. Secara fisik kondisi mereka sudah berubah ke arah yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

”Sebagian besar dari mereka telah banyak yang memiliki kios yang bersifat permanen, yaitu berdinding bata plester dan beratap genteng. Bahkan banyak diantaranya yang menggunakan pintu *rolling* atau *folding* (pintu gulung dan pintu lipat) yang harganya cukup mahal. Jenis usahanya pun sangat beragam. Tidak hanya warung makan ataupun toko kelontong kebutuhan sehari-hari namun juga terdapat usaha rental, bengkel motor maupun mobil, fotokopi, *took sellular*, baju olahraga, buku dan bahkan salon serta toko kaca mata (*optic*). Berbagai fasilitas seperti listrik dan air PAM juga dapat mereka peroleh.”
(Wawancara, 20 April 2010)

Adapun Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara sendiri berjumlah sekitar 160 PKL. Dari jumlah tersebut, sebagian besar

merupakan PKL dengan bangunan permanen (seluruh maupun sebagian bangunan selalu berada di tempat), jumlahnya mencapai 104 PKL. PKL dengan bangunan permanen memiliki variasi yang cukup banyak, antara lain permanen seluruhnya dan permanen sebagian. Tipe bangunan permanen juga sering disebut dengan bangunan bongkar pasang, gerobag atau gelaran/ dasaran/ lesehan. PKL dengan bangunan bongkar pasang dan gerobag tersebut jumlahnya 49 PKL. Yang menarik, banyak PKL yang menggunakan mobil sebagai sarana untuk berdagang, jumlahnya mencapai 6 mobil dari total PKL yang cenderung menetap. Adapun lebar masing-masing kios PKL waktu itu hampir seragam yaitu sekitar 3 m sesuai dengan lebar trotoar yang ada. Sedangkan panjangnya bervariasi sesuai dengan besaran yang diinginkan pemilik awal serta sesuai kebutuhan jenis dagangan. Panjang yang ada berkisar antara 3 m sampai dengan 9 m.

Tabel II.2
Type Bangunan/ Tempat PKL yang Cenderung Menetap
Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008

No	Type Bangunan/ Tempat	Jumlah
1	Permanen	104
2	Bongkar Pasang/ tenda	29
3	Gerobag (cenderung berhenti)	20
4	Mobil (cenderung berhenti)	6
5	Gelaran/ Oprokan	1
	Jumlah	160

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta Tahun 2009

Gambar III.2 :
Perubahan Kondisi Fisik (Kios) PKL dan Type Bangunan
Bongkar Pasang dan Gerobag
di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008



Sumber: pipw.lppm.uns.ac.id

Umumnya jenis usaha PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara ini adalah warung makanan dan minuman, bengkel kendaraan, tambal ban, rental jasa pengetikan, *counter hp* dan pulsa, warung rokok, jasa fotokopi, pakaian, toko komputer, toko kelontong dan warnet. Usaha PKL ini berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan para mahasiswa. Para PKL tersebut kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK) pada tahun 2000.

Tabel II.3
Jenis Dagangan PKL
Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Makanan dan minuman	60
2	<i>Voucher HP</i>	17
3	Pakaian	4
4	Jasa <i>Fotocopy</i>	11
5	Bengkel Kendaraan	2
6	Toko Kelontong	6
7	Tambal Ban	5
8	Rental Jasa Pengetikan	10
9	Toko Komputer	7

10	Warnet	5
11	Onderdil	7
12	Duplikat Kunci	2
13	Koran	2
14	Sol Sepatu	1
15	Helm	3
16	Radiator	1
17	Material	1
18	Cuci Motor	2
19	Penjahit	3
20	Toko Rokok	7
21	Plat Nomor	1
22	Potong Rambut	2
23	Kaos Kaki	1
	Jumlah	160

Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Tahun 2009

Ditinjau dari waktu berdagang, jumlah PKL yang menempati lokasi secara relatif permanen jumlahnya cukup besar mencapai 104 PKL. Lamanya waktu berdagang PKL biasanya terkait dengan bangunan tempat berdagang PKL, semakin permanen bangunan, semakin lama pula PKL menempati area tersebut.

Tabel II.4
Waktu Berdagang PKL Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008

No	Waktu berdagang	Jumlah
1	Pagi	8
2	Siang	14
3	Sore	23
4	Malam	3
5	Pagi-siang	5
6	Pagi-sore	47
7	Pagi-malam	10
8	Siang-sore	35
9	Siang-malam	6
10	Sore-malam	9
	Jumlah	160

Sumber : Kantor Pengelolaan PKL Tahun 2009

Tingkat kesadaran PKL dalam pengelolaan limbah masih sangat rendah. Dari seluruh PKL yang menghasilkan limbah, 44 PKL diantaranya masih belum dapat mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik. Jika dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang relatif menghasilkan limbah adalah PKL yang menjual makanan (PKL jenis ini sebesar 60 PKL, hal ini berarti hanya 16 PKL penjual makanan yang telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik).

Tabel II.5
Pengelolaan Limbah PKL Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008

No	Keterangan	Jumlah
1	PKL mengelola limbah dengan baik	44
2	PKL tidak mengelola limbah dengan baik	16
	Jumlah	60

Sumber: Kantor Pengelolaan PKL Tahun 2009

Kebersihan dan kerapian lingkungan secara fisik belum begitu bersih dan terlihat kumuh. Dari jumlah PKL yang bersih dan rapi sebesar 72 PKL sedangkan jumlah PKL yang belum bersih dan rapi sebesar 88 PKL.

Tabel II.6
Kebersihan dan Kerapian lingkungan PKL
di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008

No	Lingkungan PKL	Jumlah
1	Bersih dan rapi	72
2	Belum bersih dan rapi	88
	Jumlah	160

Sumber: Kantor Pengelolaan PKL Tahun 2009

Adapun kondisi utilitas yang berkaitan langsung dengan PKL adalah sebagai berikut:

- a. Air Bersih, sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan, air menjadi salah satu kebutuhan primer bagi PKL terutama bagi PKL yang menjual makanan dan minuman. Selain untuk kepentingan itu air juga setiap saat dibutuhkan bila dalam keadaan darurat yaitu bila terjadi bahaya kebakaran. Selama ini para PKL memenuhi kebutuhan air bersih dari Masjid Nurul Huda, UNS. Yang dibutuhkan para PKL adalah kran-kran air bersih dan kran pemadam kebakaran.
- b. Sanitasi/ Toilet, dibutuhkan karena para PKL melakukan kegiatannya dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 10 jam bahkan PKL makanan dan minuman hampir selalu berkegiatan 24 jam. Sehingga kegiatan MCK dapat terpenuhi di sini. Kebutuhan ini dapat dijadikan satu dengan keberadaan air bersih/ kran air.
- c. Saluran Pembuangan, PKL dengan jenis usaha makanan dan minuman sangat membutuhkan jaringan ini. Dengan kegiatan utama memasak, PKL di sini belum memiliki saluran pembuangan khusus sehingga

sering tercium bau kurang sedap di lingkungan terdekatnya. Yang dibutuhkan pada sebagian besar PKL, yaitu yang berjenis usaha makanan dan minuman adalah saluran pembuangan (*drainase*).

- d. Jaringan listrik, meskipun kegiatan PKL tergolong kegiatan yang belum legal, kebutuhan akan penerangan telah dipenuhi dengan dipasangnya jaringan listrik sesuai permintaan masing-masing PKL yang menghendaki.

Tempat sampah, meskipun tidak diseragamkan, kebutuhan tempat sampah pada beberapa PKL telah ada. Namun belum ada penyesuaian antara tempat sampah dan jenis sampah yang ada. Seperti sampah padat yang tidak berbau (sampah non organik) membutuhkan tempat sampah yang ringan dan tertutup. Sedangkan sampah padat berbau (sampah organik) membutuhkan tempat sampah yang aman dan tertutup secara rapat. Dan jenis sampah ketiga adalah sampah cair baik organik maupun non organik dapat dibuang ke saluran pembuangan tertutup. (pipw.lppm.uns.ac.id)

Gambar III.3 :
Kondisi PKL Semi Permanen dan Permanen
tanpa jaringan utilitas yang lengkap
Di Jalan Ki Hajar Dewantara Tahun 2008



Sumber: pipw.lppm.uns.ac.id

Pada perkembangan PKL selanjutnya, semakin menjadi-jadi ketika program pemagaran kampus secara menyeluruh dalam desain wujud fisik dinding tembok yang rapat. Dengan telah adanya dinding pagar, PKL semakin berani membangun kiosnya secara permanen. Hal itu karena telah hilang salah satu keengganan (*pekewuh*) karena dulu sebelum dipagar, kondisi mereka terlihat langsung dari arah kampus.

Secara keseluruhan pertumbuhan antara satu PKL dengan PKL yang lain mempunyai karakter yang berbeda-beda demikian juga dengan modal dan latar belakangnya. Dari sini akhirnya tumbuh PKL dengan jenis dagangan yang sangat variatif dan persebaran yang sangat bebas. Maksudnya pola sebaran yang ada tidak memiliki aturan-aturan tertentu. Apakah berdasarkan jenis dagangan, urutan kedatangan ataukah aturan-aturan yang lain. Sehingga sampai tahun 2009 pun belum ada pengelompokan komoditi dari para PKL sendiri. Jika diamati secara teliti kondisi PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara, tidak jelas jenis usahanya. Hanya sedikit yang tetap bertahan dengan jenis usahanya semula.

Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang seseorang akhirnya memilih menjadi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara, salah satunya faktor ekonomi yaitu dengan adanya krisis moneter sehingga sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kemudian masyarakat mencoba mengadu nasib dengan menjadi PKL. PKL menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut penuturan Heri, seorang PKL rental komputer :

”Saya berjualan dekat kampus untuk menyambung hidup, mbak. Di belakang kampus itu kan banyak mahasiswa dan Saya menjual apa yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Ya, contohnya ini, usaha rental. Kan banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa rental untuk mengerjakan tugas, seperti membuat makalah, paper, gitu mbak”.
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Pendapat tersebut sejalan dengan pengakuan Bapak Sumadi, seorang

PKL fotokopian yang mengemukakan alasan menjadi PKL :

“Saya berjualan dekat kampus karena banyak mahasiswa yang pasti membutuhkan jasa fotokopi Saya ini mbak. Ya, banyak dari mereka yang memfotokopi buku-buku kuliah. Dengan begitu kan Saya tidak menganggur dan dapat memenuhi kebutuhan hidup Saya dan keluarga.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Selain itu latar belakang pendidikan juga menjadi alasan PKL sehingga sulit mencari pekerjaan, seperti yang diungkapkan Bapak Bondan, PKL yang menyediakan jasa servis peralatan elektronik sebagai berikut:

“Saya ini cuma lulusan SMK, sedangkan keahlian yang Saya miliki juga hanya di jasa servis ini.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Faktor modal juga menjadi alasan terjunnya masyarakat di usaha PKL. Jika dilihat dari segi modal usaha, maka usaha para PKL tergolong tidak membutuhkan modal yang besar. Hal ini diutarakan oleh Bu Hadi, seorang PKL makanan:

“Saat ini cari kerja sulit, bahkan sarjana pun banyak yang nganggur, usaha yang modalnya tidak begitu besar ya ini mbak, berjualan makanan, nasi sayur ini.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Akan tetapi para PKL menempati lahan-lahan kosong di sekeliling kampus secara ilegal. Oleh karena itu, menimbulkan kesan semrawut sehingga tidak sedap dipandang. PKL seringkali juga mengganggu

ketertiban, karena pembeli kendaraan yang datang biasanya memarkirkan kendaraannya di badan jalan akibat keterbatasan tempat. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

“Pada dasarnya PKL itu kan ilegal. Mereka menimbulkan kesan semrawut serta mengganggu ketertiban sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Apalagi jika mereka berjualan di dekat dengan kampus, maka PKL itu dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar mengajar mahasiswa.“
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Oleh karena itu, Pemkot melaksanakan kebijakan relokasi PKL. Kebijakan relokasi PKL merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh PKL di Kota Surakarta. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

“Banyak masalah yang ditimbulkan karena keberadaan PKL, seperti kemacetan lalu lintas serta kebersihan yang kurang terjaga di sekitar lokasi PKL berdagang. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan relokasi, dimana setiap PKL itu kemudian ditertibkan dan ditata supaya tidak mengganggu lalu lintas serta menciptakan keindahan dan kerapian kota.“
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM berikut ini :

“Kebijakan relokasi PKL ini berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dimana dalam Perda tersebut menyebutkan

bahwa setiap PKL harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah ingin mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan Indah.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Adapun kebijakan relokasi PKL di Kota Surakarta telah dilaksanakan sejak tahun 1995. Saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah PKL di Surakarta, maka dibentuklah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta pada tahun 2001. Sejak saat itu tugas untuk melaksanakan kebijakan relokasi PKL Kota Surakarta dijalankan oleh Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta.

Kebijakan relokasi PKL di Kota Surakarta dilaksanakan di seluruh wilayah Surakarta. Salah satunya yaitu PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu Pasar Pangungrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 1995 maka Pemkot Surakarta kemudian menjabarkan kebijakan tersebut dalam bentuk program pembinaan, penataan dan penertiban PKL. Program tersebut lalu dijabarkan lagi dalam bentuk kegiatan. Beberapa tahap kegiatan tersebut dikategorikan dalam beberapa tahap yaitu tahap sosialisasi kebijakan, tahap penertiban, tahap penataan serta tahap pembinaan.

B. Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL

Pada dasarnya efektivitas kebijakan relokasi PKL merupakan suatu konsep untuk mengukur tercapainya tujuan dari kebijakan relokasi PKL baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Dalam hal ini, maka efektivitas kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dapat dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan relokasi yaitu untuk mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan Indah sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hal itu berkaitan dengan dibangunnya Solo *Techno Park* dan rencana pelebaran jalan di Jalan Ki Hajar Dewantara, sehingga para PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara harus direlokasi.

Realisasi pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam kebijakan relokasi PKL sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995 merupakan dasar hukum bagi Pemkot Surakarta untuk mengatasi persoalan PKL. Sebagai pedoman pelaksanaannya Pemkot Surakarta kemudian menerbitkan Surat keputusan No. 2 Tahun 2001. Pemkot Surakarta melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Walikota yang mengatur PKL yaitu guna memperjelas

pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum, larangan tempat berusaha PKL, kewajiban PKL, perizinan, pencabutan izin dan pembinaan. Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan beberapa instansi dan pihak yang terkait, antara lain: Kantor Pengelolaan PKL, Satpol PP dan Paguyuban PKL.

Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan mulai bulan Februari 2008 sampai bulan Juni 2008. Tahap 2 dilaksanakan bulan Januari 2009 sampai bulan Juni 2009. Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan cara persuasif, yaitu dengan secara langsung, memberikan penjelasan mengenai Perda secara *door to door*, yaitu aparat petugas mensosialisasikan kepada setiap PKL dengan mendatangi mereka untuk diberi penjelasan dan pengarahan atau dengan cara mengundang mereka untuk berkumpul di Kecamatan ataupun Kantor Pengelolaan PKL untuk diberikan informasi dan pengarahan kepada PKL. Setelah PKL tahu diharapkan mereka dapat memahami dan mematuhi aturan agar apa yang sudah menjadi tujuan program dapat tercapai.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL :

“Menegenai sosialisasi kami memberikan informasi dengan cara *door to door*, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolaan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sosialisasi secara langsung dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan PKL melibatkan paguyuban PKL yang ada. Dengan demikian, Pemkot akan mendapatkan masukan, saran atau kritik dari PKL mengenai masalah-masalah yang ada sehingga PKL juga dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Heri, seorang PKL rental komputer, seperti berikut :

”Kita diundang dan didatangi langsung oleh Pemkot untuk datang ke Gedung Kecamatan dan Balai Kota Surakarta. Di sana kita dijelaskan mengenai informasi Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Kemudian untuk sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan bantuan sarana media cetak, media massa/ radio, brosur/ selebaran untuk menginformasikan dan menjelaskan Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL di Kota Surakarta.

Seperti yang diungkapkan seorang PKL jasa servis elektronik, Bapak Bondan sebagai berikut :

“Saya tahu kalau ada program dari spanduk, jadi belum begitu paham.”
(Wawancara. 11 Maret 2010)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersifat preventif, bertujuan mencegah adanya pelanggaran dengan mengenalkan terlebih dahulu tentang aturan dalam Perda. Selain itu sosialisasi juga bersifat kuratif, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran PKL agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi yang mengarah pada kegiatan pembinaan PKL. Namun jika PKL masih sulit untuk diatur, maka Pemkot melalui Satpol PP akan melakukan eksekusi. Adapun eksekusi yang dimaksudkan yaitu dengan penyitaan, perampasan yang merupakan kewenangan Satpol PP sebagai penegak Perda. Adapun jadwal sosialisasi dilaksanakan setiap hari seiring dengan upaya penataan dan penertiban PKL yang terangkum dalam program kerja tahunan yang dijabarkan dalam program rutin setiap bulannya. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Perda berjalan secara maksimal seperti yang diungkapkan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL berikut ini:

”Supaya pelaksanaan Perda berjalan maksimal maka jadwal sosialisasi dibuat dalam program kerja tahunan yang dijabarkan dalam program rutin setiap bulan dengan tempat pelaksanaan yang berbeda. Seperti di gedung kecamatan ataupun di Balaikota.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Dalam melakukan suatu kegiatan, tak jarang menemui hambatan. Begitu pula dengan kegiatan sosialisasi ini. Adapun hambatan sosialisasi dapat dilihat dari rasa keberatan untuk direlokasi yang diungkapkan Rizal PKL spesialis *card read* :

“Sebenarnya Saya agak keberatan untuk direlokasi. Namun, Saya setuju-setuju saja kalau mau dipindah, tapi kita semua serentak harus pindah.”

(Wawancara, 11 Maret 2010)

Begitu pula yang dikatakan Bu Hadi, seorang PKL makanan sebagai berikut :

“Agak keberatan juga karena saya khawatir di tempat baru nanti tidak laku. Kita sebagai rakyat kecil hanya berharap semoga kebijakan relokasi PKL tetap memperjuangkan kepentingan para PKL demi kebaikan bersama.”

(Wawancara, 11 Maret 2010)

Menanggapi hal tersebut Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta mengungkapkan sebagai berikut:

”Tidak ada alasan pedagang khawatir kehilangan konsumen jika harus menempati lokasi baru, sebab jarak antara tempat berdagang lama dengan lokasi baru, tak lebih dari 500 meter. Selain itu, pelanggan para pedagang sebenarnya juga sudah jelas, yakni kalangan mahasiswa yang kebetulan berdiam atau kos di sekitar belakang kampus UNS. Kemanapun pedagang berpindah, sepanjang pelayanan yang diberikan tetap berkualitas, apalagi tempat berpindah lebih nyaman, konsumen tetap akan memburu. Sebagai gambaran dia menyebut, sekitar tiga tahun lalu, ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Monumen 45 Banjarsari yang berada di tengah kota direlokasi ke kawasan Semanggi yang berada di pinggiran kota, muncul juga kekhawatiran akan kehilangan konsumen. Tapi apa yang terjadi sekarang, pada hari Sabtu dan Minggu ataupun hari-hari libur lainnya, areal parkir di Pasar Notoharjo Semanggi yang sebenarnya relatif luas, tak mampu menampung kendaraan para pengunjung. Kuncinya adalah pada kekompakan pedagang itu sendiri.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kurangnya sosialisasi menimbulkan respon pro kontra dari para PKL, hal ini menjadi salah satu hambatan sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Seperti yang

diungkapkan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta :

“Hambatan sosialisasi terletak pada pro dan kontra di kalangan PKL. Ketika mereka diberi tahu mengenai aturan yang ada, mereka hanya diam dan bilang setuju tapi nyatanya banyak dari PKL tidak melaksanakan komitmen yang ada.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sosialisasi Program Relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dilakukan melalui 2 cara persuasif, yaitu secara langsung memberikan penjelasan mengenai Perda secara *door to door*. Cara ke-2 yaitu secara tidak langsung, dengan bantuan sarana media cetak, media massa/ radio, brosur/ selebaran untuk menginformasikan dan menjelaskan Program Relokasi PKL di Kota Surakarta. Keberatan dari PKL mengenai larangan dalam Perda, adanya pro kontra dari PKL yang disebabkan dari kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga hasil dari proses sosialisasi kurang berjalan dengan baik.

2. Tahap Penertiban

Tahap selanjutnya adalah tahap penertiban. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995 dengan Pedoman Pelaksanaan SK Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 pada pasal 2 para PKL dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum seperti: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan dan sekitar bangunan tempat ibadah.

Penertiban PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai Agustus 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai Agustus 2009. Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda dan produk hukum yang lain.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door to door*). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkali-kali.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta:

“Kami mengajak dan membina langsung PKL yaitu dengan memberikan informasi dengan cara *door to door*, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolaan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota, maka dapat terlihat sekarang ini keberadaan PKL sudah banyak dan mengganggu arus lalu lintas. Seperti halnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. Keberadaan mereka mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar kampus karena tempat itu merupakan ruang publik. Sebelum

diserbu PKL, tanah lapang belakang kampus UNS digunakan sebagai tempat bagi pejalan kaki (*pedestrian*). Sejak ada PKL, nyaris tidak ada ruang untuk publik. Para PKL yang menempati ruang publik atau fasilitas umum tersebut pada dasarnya telah melanggar ketentuan SK Walikota. PKL yang berjualan di wilayah pedestrian atau sekitar tempat pendidikan tentu saja menimbulkan permasalahan baru. PKL menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, kecelakaan serta kebersihan lingkungan sekitar kampus tidak diperhatikan. Seperti yang diungkapkan Refy, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS sebagai berikut :

“Keberadaan PKL di sini sangat mengganggu. Untuk jalan kaki saja susah, harus ekstra hati-hati karena dekat sekali dengan jalan raya, sedangkan banyak mahasiswa yang berjalan kaki, kebersihan tidak dijaga serta lingkungan terlihat semrawut. Dan di sini rawan kecelakaan juga”
(Wawancara, 15 Maret 2010)

Awalnya PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara tidak mau direlokasi. Hal ini selain karena faktor ekonomi juga karena bagi mereka berjualan di lokasi tersebut sangat menguntungkan karena letaknya yang strategis. Kekhawatiran lain yang juga muncul ketika pindah ke tempat yang baru yaitu sulit menjalin hubungan dengan pelanggan baru. Setelah mendapat penjelasan dan informasi yang jelas mengenai relokasi ke tempat yang baru, akhirnya para PKL Jalan Ki Hajar Dewantara dengan sukarela direlokasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta :

“Kegiatan penertiban dilakukan setiap hari secara rutin dengan lokasi yang sudah dijadwalkan. Jika ada pelanggaran, maka tim gabungan antara Kantor Pengelolaan PKL dan Satpol PP akan menindak.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta:

”Tahap pertama penertiban adalah dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan kemudian direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres itu. Saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan. Jika masih terdapat pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekat maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggar akan diajukan ke pengadilan.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak menghiraukannya, petugas dari Kantor Satpol PP akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta sebagai berikut :

“Setelah kita bina, kemudian ditata namun sampai pemberian surat peringatan tiga kali belum bisa berjalan dengan baik maka kita rekomendasikan ke Kantor Satpol PP sebagai Penegak Perda di lapangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan, penyitaan dan pemusnahan.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Realisasinya pada pelaksanaan penertiban, tidak ada tindakan penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Pangungrejo berikut ini:

”Kegiatan penertiban berlangsung dengan cukup baik. Para PKL menyadari bahwa keberadaan mereka mengganggu jalan, jadi mereka mau untuk ditertibkan. Jadi tidak ada tindakan seperti penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh Satpol PP.”

(Wawancara, 20 April 2010)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemkot akan bertindak tegas kepada PKL yang masih melanggar. Sebelum dilaksanakan penertiban di lapangan, Kantor Pengelolaan PKL dan instansi terkait telah memperingatkan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar. Jika mereka masih melanggar, Satpol PP selaku Penegak Perda akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door to door*). Kesadaran PKL untuk pindah ke lokasi yang telah ditentukan cukup baik sebab dari pihak Pemkot langsung terjun ke lapangan dan menggunakan cara-cara yang santun kepada PKL. Pada akhirnya, kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot untuk PKL kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara mendapat respon baik. Sebagian besar PKL menerima untuk dipindah

ke lokasi baru yaitu di belakang Kantor Kecamatan Jebres yang telah disediakan oleh Pemkot dengan tertib.

3. Tahap Penataan

Penataan di sini mengandung arti sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa budaya dan lingkungan sesuai dengan visi Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pariwisata dan olahraga dengan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan serta memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Konsep penataan dari Kantor Pengelolaan PKL yaitu bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi dari tempat atau fasilitas umum sesuai dengan fungsi aslinya seperti yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 tahun 1995.

Upaya Pemkot untuk menata PKL kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara adalah dengan relokasi. Relokasi dilakukan karena jumlah PKL di kawasan tersebut sangat banyak dan memusat sehingga menimbulkan kekumuhan, kesemrawutan dan juga rawan kecelakaan. Tempat relokasi yang baru terdapat di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Di lokasi yang baru, para PKL diberi kios secara gratis serta dibebaskan biaya izin. Di sisi lain lokasi yang ditinggalkan yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara menjadi asri sehingga dapat mengembalikan

fungsi semula yaitu sebagai kawasan publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL berikut ini :

“Untuk PKL kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara upaya penataan yang tepat adalah relokasi karena jumlah PKL yang sangat banyak sehingga membentuk suatu komunitas yang mirip pasar.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan September 2008 sampai November 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2009 sampai November 2009. Sedangkan tahap ini ingin membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik, tidak ramah menjadi ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu sendiri.

Pada tahap penataan ini pendekatan yang digunakan adalah secara *door to door*. Yaitu pendekatan yang dilakukan aparat dengan mendatangi kios satu persatu untuk mengadakan peneguran atau peringatan secara lisan kepada para PKL yang melanggar ketentuan perundangan. Penataan PKL juga dilakukan secara persuasif, yaitu mengajak PKL untuk bersedia pindah secara bersama-sama ke tempat yang telah disediakan oleh Pemkot Surakarta yaitu di belakang Kantor Kecamatan Jebres.

Tahap pertama dalam penataan ini adalah pendataan PKL untuk menempati kios baru. PKL yang tidak mendaftarkan diri akan

ditinggal, selanjutnya lahan yang diprioritaskan untuk mereka akan diisi oleh PKL lain. Beberapa persyaratan administrasi yang lain yakni seperti yang diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggungrejo berikut ini:

”Jadi para PKL diharuskan untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan foto diri. Dalam pendataan ulang berikutnya PKL harus mencantumkan jenis usahanya, kemudian baru pembagian kios.”
(Wawancara, 7 April 2010)

Pelaksanaan pindah dilakukan secara bersamaan (bedol kampung) dengan aman dan tertib. Setelah kios baru siap, pembagian kios (penempatan pedagang) telah selesai serta alat angkut yang telah disediakan Pemkot telah tersedia maka para PKL mengemasi barang dagangan yang nantinya akan digelar lagi di tempat kios yang baru. Sama halnya yang dilakukan oleh Rizal, PKL yang menjual *card read* berikut:

“Waktu itu Saya mengemasi barang dagangan Saya kemudian mengangkutnya ke kios baru di Pasar Panggungrejo ini. Hal itu Saya lakukan dengan beberapa PKL lainnya mbak.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Sesungguhnya banyak keuntungan yang dapat diperoleh para PKL dengan pindahnya mereka ke Pasar Panggungrejo. Hal itu secara lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta berikut:

”Keuntungan yang diperoleh para PKL antara lain adanya jaminan usaha, tersedianya fasilitas usaha yang sangat layak, peningkatan status usaha yaitu dari PKL menjadi Pedagang Pasar, serta menguatnya kesohoran (*brand image*) usaha. Selain itu juga perizinan resmi diberikan gratis oleh Pemkot

seperti: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Hak Penempatan (SHP), pelatihan manajemen, bantuan modal usaha dan penjaminan pinjaman perbankan dari Pemkot yang masih diusahakan oleh Pemkot untuk segera terealisasikan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Dulunya kondisi belakang Kantor Kecamatan Jebres merupakan lahan kosong yang tidak ada bangunan dengan luas lahan yang tersedia adalah 3.364 m². Kemudian Pemkot merencanakan membuat lahan kosong tersebut menjadi pasar yang terdiri dari kios berukuran 2 x 3 m sebanyak 200 unit dimana bangunan yang ada terdiri dari kios berlantai dua, Mushola, Lavatori (kamar mandi dan toilet umum), Gedung Kantor Pengelola ukuran 2 x 3 m. Adapun pembangunan pasar ini menelan dana pemkot sekitar Rp 4,2 miliar melalui pembiayaan APBD selama dua tahap yaitu tahap pertama dengan biaya Rp 1,9 miliar dari APBD 2008 berhasil dibangun 93 kios, lalu tahap II APBD 2009 (Rp 2,3 miliar) terbangun 108 kios. Total kios di pasar itu sejumlah 201 unit dan dihuni oleh 199 pedagang, sisa kios yang lain untuk kantor pengelola dan fasilitas penunjang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggungrejo berikut ini:

“Untuk menjaga kerapian dan kebersihan maka di Pasar Panggungrejo ini juga dilengkapi dengan keranjang sampah yang ditempatkan di masing-masing kios untuk kemudian dibuang ke kontener sampah yang juga telah disediakan di Pasar Panggungrejo ini. Selain itu juga kios dilengkapi dengan jaringan listrik.”
(Wawancara, 20 April 2010)

**Gambar III.4:
Fasilitas di Pasar Panggunrejo
Mushola, Toilet dan Kontener Sampah Tahun 2010**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun kios di Pasar Panggunrejo dibuat bertingkat dengan alasan mengikuti pembangunan pasar-pasar modern lainnya, dimana sengaja dibuat bertingkat. Lebih lanjut Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggunrejo menjelaskan berikut ini:

”Pembangunan kios ini memang sengaja dibuat bertingkat dengan memanfaatkan lahan yang ada. Karena dengan lahan yang ada, tidak memungkinkan untuk membuat kios dengan tidak bertingkat, jadi akan lebih efisien mendirikan kios bertingkat. Sehingga nantinya tidak akan makan tempat. Selain itu pembangunan kios di Pasar Panggunrejo ini bertingkat karena mengacu pada pembangunan pasar modern pada umumnya yang berlantai dua ataupun tiga.”

(Wawancara, 20 April 2010)

**Gambar III.5:
Kios Bertingkat di Pasar Panggunrejo Tahun 2010**



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Di tempat kios yang baru ini dibuat *zoning* sesuai dengan jenis usahanya, selain untuk memudahkan pembeli juga untuk keteraturan penataan internal lokasi baru. Dimana lantai bawah untuk kawasan kuliner (makanan). Sedangkan lantai atas untuk kawasan fotokopi, rental, asesoris dan pakaian. Setelah itu, secara lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta berikut:

“Untuk pengundian kios dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar yang melibatkan paguyuban PKL.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Pada kenyataannya, walaupun sudah ada *zoning*, ada PKL makanan dan juga bengkel yang mendapatkan kios di atas. Menjawab hal tersebut Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggunrejo mengungkapkan berikut ini:

“Untuk PKL makanan dan bengkel yang mendapatkan kios di atas itu terjadi ketika penataan kios untuk tahap 1. Penataan memang terbilang masih belum baik, salah satunya karena ada PKL makanan dan bengkel yang mendapatkan kios di atas itu. Untuk usaha bengkel seharusnya menyesuaikan dengan jenis usaha yang ada di pasar, seperti misalnya makanan, kelontong dan sebagainya.”
(Wawancara, 20 April 2010)

Upaya Pemkot untuk menata PKL kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara adalah dengan relokasi. Proses Penataan yang dilakukan Pemkot telah berjalan cukup lancar tapi mempunyai beberapa hambatan antara lain tempat yang sekarang kurang strategis dan penempatan pedagang yang ternyata masih belum sesuai dengan *zoning* yang ada. Selain itu juga, di tangga belum ada kanopinya serta

bangunan kios di atas, belum ada saluran pembuangan air hujan. Sehingga ketika hujan, tangga dan bangunan kios di atas itu basah karena genangan air hujan. Hal tersebut ditanggapi oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggunrejo berikut ini:

”Untuk beberapa masalah seperti tangga yang tidak berkanopi serta kios di lantai atas yang belum terdapat saluran pembuangan air hujan, itu karena dulu salah konstruksinya. Oleh karena itu, kami mengajukan anggaran kepada Dinas Pengelolaan Pasar untuk pembangunan kembali guna mengatasi permasalahan itu.”
(Wawancara, 20 April 2010)

4. Tahap Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2008 sampai seterusnya. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai seterusnya. Konsep pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Pembinaan ini bertujuan mengarahkan para PKL agar mau menaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat tindakan di lapangan, juga tindakan yang bersifat persuasif atau pembinaan yang bersifat ajakan. Jadi aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal

tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT,
Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta :

”Jadi selain kami menjelaskan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi perda yang kami sosialisasikan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Dengan pembinaan melalui sosialisasi program kerja, diharapkan para PKL dapat memahami mengenai konsep PKL yang baik dan ideal. Dimana hal itu harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemkot sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi bahwa PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

Di satu sisi, PKL mengurangi keindahan dan mengganggu ketertiban kota. Akan tetapi, di sisi lain PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaan dilakukan agar mereka bisa berkembang seiring dengan pembangunan kota.

Pembinaan dilakukan melalui dua cara:

- 1) Pembinaan secara *door to door* dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini

menekankan agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan.

- 2) Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas.

Pembinaan mencakup beberapa macam materi yang disesuaikan dengan tujuannya, diantaranya:

- a) Bina Usaha Manusia

- Memberikan keterampilan berusaha
- Memberikan penyuluhan tentang kewiraswastaan dan pengenalan kebijakan Pemkot yang berlaku.

- b) Bina Sarana dan Prasarana

- Menyediakan lokasi penampungan
- Menyediakan sarana dan prasarana
- Memberikan kemudahan dalam proses perizinan

- c) Bina Permodalan

- Meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasi
- Meningkatkan kemampuan permodalan dengan fasilitas kredit

- d) Bina Pemasaran

- Memberikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran

e) Bina Organisasi

- Mengupayakan terbentuknya organisasi yang mampu mewadahi kegiatan atau usaha (koperasi)

f) Bina lingkungan

- Melaksanakan program berseri
- Membina lingkungan kerja
- Memberikan rasa aman, tenang dan tenteram dalam berusaha

Dari beberapa macam materi dalam pembinaan tersebut, yang sudah dilaksanakan di Pasar Panggunrejo yaitu Bina Sarana dan Prasarana, Bina Pemasaran dan Bina Lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggunrejo berikut ini:

”Berkaitan dengan Bina Sarana dan Prasarana, maka Pemkot telah menyediakan menyediakan lokasi penampungan bagi para PKL yaitu di Pasar Panggunrejo ini. Kemudian Pemkot juga menyediakan sarana dan prasarana di Pasar Panggunrejo ini, seperti Mushola, Lavatori (kamar mandi dan toilet umum), tempat sampah, saluran pembuangan, jaringan listrik, tangga serta kontener sampah. Kami juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan dalam menempati kios ini. Lalu berkaitan dengan Bina Pemasaran, para PKL diberitahukan tentang manajemen dalam pemasaran. Hasilnya para PKL diampu Ketua Paguyuban PKL membuat spanduk besar di dekat Pasar Panggunrejo untuk mengenalkan apa saja yang ada di sana. Hal itu dimaksudkan untuk menarik pengunjung. Kemudian berkaitan dengan Bina Lingkungan yaitu dengan melaksanakan program berseri, itu dilakukan dengan menjaga kerapian serta kebersihan pasar. Selain itu juga dengan membina lingkungan kerja serta memberikan rasa aman, tenang dan tentram dalam berusaha.”

(Wawancara, 20 April 2010)

Sedangkan materi pembinaan yang lain masih dalam rencana, yang akan segera direalisasikan ketika ada anggaran yang mencukupi. Seperti dibentuknya koperasi dalam rangka meningkatkan usaha para PKL dengan pemberian pinjaman lunak untuk menambah permodalan mereka.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka untuk kepentingan pengaturan dan pengembangan usaha serta guna meningkatkan kesejahteraan PKL maka perlu dibentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima.

Tim Pembina Pedagang Kaki Lima berdasarkan Pasal 10 Keputusan Walikota tersebut mempunyai tugas-tugas antara lain :

- 1) Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahaan kepada Pedagang Kaki Lima.
- 2) Memberikan pertimbangan sarana lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Secara lebih jelas diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta berikut ini:

”Pembinaan dilaksanakan dengan konsep *”win-win solution”* yaitu PKL tidak dianggap mengganggu lingkungan dan masyarakat masih membutuhkan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pelaksanaan pembinaan oleh Kantor Pengelola PKL dilakukan setiap hari dengan lokasi yang berbeda sesuai jadwal kegiatan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Untuk PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang bersedia direlokasi dan telah menempati kios-kios di belakang Kantor Kecamatan Jebres, kegiatan pembinaan dilakukan secara bersamaan di lokasi yang baru tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta sebagai berikut :

”Pasca relokasi kita masih ada pembinaan dan ada *maintenance*, Mengapa tidak laku? Mengapa tidak ramai? Hal-hal seperti itu akan kita evaluasi. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kegiatan pembinaan pedagang pasca relokasi antara lain seperti dukungan media promosi untuk penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah lokasi, baliho dan *leaflet*, bantuan penyediaan sarana dan prasarana di Pasar Panggungrejo serta dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan dan bantuan pinjaman lunak untuk pedagang.

Bantuan pinjaman lunak dari Pemkot menurut salah seorang pedagang belum cair. Hal ini dikarenakan PKL baru saja pindah dan surat-suratnya belum diberikan. Hal ini diungkapkan oleh seorang pedagang rental komputer, Heri, sebagai berikut :

”Belum ada pinjaman dari pemerintah karena kita baru menempati lokasi ini dan juga surat-suratnya belum diberikan kepada kami.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Hadi, seorang pedagang makanan berikut ini :

“Kita baru saja menempati kios ini, jadi belum terbentuk koperasi.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Upaya pembinaan PKL di belakang Kantor Kecamatan Jebres dilakukan dengan cara mendatangi kios satu-persatu. Dengan menggunakan cara persuasif PKL diharapkan selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan pedagang pasca relokasi antara lain: dukungan media promosi untuk penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah lokasi, baliho dan *leaflet* serta penyediaan sarana dan prasarana di Pasar Pangungrejo.

Tabel IV.1
Matrik Tahapan Kegiatan Relokasi PKL
di Jalan Ki Hajar Dewantara

No	Tahap Pelaksanaan	Hasil	Analisis
1.	Sosialisasi	-Dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung - Sifat preventif dan kuratif -PKL kurang paham terhadap program Pemkot	Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan kurang baik, terbukti dengan PKL masih ada yang kurang memahami terhadap program
2.	Penertiban	-Dengan cara persuasif dan secara langsung	Memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini nampak dari kerelaan PKL Kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara untuk direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres dengan tertib.
3.	Penataan	-Relokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres secara bersama-sama	Proses penataan yang dilakukan Pemkot telah berjalan lancar tapi ada beberapa hambatan antara lain tempatnya

4.	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> -Secara <i>door to door</i> dan pengumpulan PKL -Komunikasi lisan untuk mengetahui permasalahan. -Secara persuasif mengedepankan aspek situasi kondisi -Materi pelatihan manajemen, dukungan media promosi untuk penyebaran informasi produk, bantuan pinjaman lunak 	<p>kurang strategis dan di tempat yang baru saluran resapan air tidak baik, sehingga menyebabkan banjir.</p> <p>Pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku. Akan tetapi bantuan pinjaman lunak belum ada karena belum terbentuk koperasi.</p>
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan kebijakan relokasi di atas, pada akhirnya diketahui bahwa tujuan kebijakan tercapai. Adapun tujuan dari kebijakan relokasi adalah mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan Indah. Apalagi sehubungan dengan dibangunnya *Solo Techno Park*, yang rencananya akan diadakan pelebaran jalan di Jalan Ki Hajar Dewantara. Tercapainya tujuan tersebut nampak ketika PKL mau direlokasi ke Pasar Panggungrejo sehingga tercipta kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara. Adapun pelaksanaan relokasi PKL tersebut dengan mengutamakan pendekatan persuasif, yaitu dengan mengajak para PKL untuk menaati Perda, sehingga PKL mau dipindah ke tempat yang sudah disediakan yaitu di belakang Kantor Kecamatan Jebres (Pasar Panggungrejo).

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL

Keberhasilan dari program relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut salah satunya yaitu dapat dilihat dari bagaimanakah pelaksanaannya. Melalui pemahaman tentang sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran yang telah berjalan selama ini akan diketahui lebih jauh seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan relokasi PKL, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan relokasi PKL.

1. Sikap Pelaksana

Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima. Suatu program dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang cukup mendukung. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai pelaksana program, mereka yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan relokasi PKL sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap aparat pelaksana memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidang unit kerjanya. Mereka dituntut menjalankan tugas dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas penuh agar menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat dari pelaksanaan kebijakan relokasi PKL. Sikap pelaksana tersebut berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan PKL sebelum mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi permasalahan PKL setiap unit kerja memiliki persepsi yang berbeda sehingga perlu dilakukan koordinasi antara para *stakeholders*. Namun perbedaan persepsi itu berusaha disatukan agar langkah yang diambil dapat seiring dengan sikap pelaksana dengan melihat situasi dan kondisi. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Penataan PKL diperlukan koordinasi di antara unit-unit kerja sebagai bentuk *teamwork*. Saya tidak bisa melaksanakan suatu program secara institusi semata dalam mengatasi masalah PKL. Kami melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang memiliki kewenangan mengatur trotoar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang mengelola taman, serta Kantor Satpol PP sebagai penegak Perda.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Berdasar penjelasan di atas jelas bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi PKL melibatkan berbagai institusi yang saling bekerja sama demi kelancaran program tersebut. Lebih lanjut Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta menjelaskan bahwa setiap institusi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri ketika mengambil tindakan terhadap PKL, sehingga perlu disamakan pola pikir agar tujuan tidak salah arah. Berikut penjelasannya :

“Sebelum melangkah kita harus menyamakan pola pikir. Persoalan PKL tidak hanya melibatkan kita saja. Sebagai aparat pelaksana dalam menyamakan pola pikir harus disesuaikan tujuannya agar tidak salah arah.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Aparat pelaksana dituntut untuk benar-benar paham terhadap tujuan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Ki Hajar Dewantara. Kepahaman aparat pelaksana terhadap tujuan program diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL sebagai berikut :

“Aparat kami benar-benar tahu dan paham terhadap tujuan program penertiban PKL, karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di lapangan mereka telah kami *breaving* terlebih dahulu. Saya meminta agar mereka jangan semena-mena dalam bertindak dan haruslah sesuai arahan dalam menertibkan PKL.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sikap pelaksana dalam merelokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yaitu menguasai tujuan program dimana tujuannya sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL yaitu sebagai berikut:

”Tujuan dari kebijakan relokasi itu sendiri yaitu untuk membuat kawasan bebas PKL sehingga lalu lintas tidak terganggu. Selain itu, sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*, maka relokasi PKL itu dimaksudkan agar tercipta kawasan yang asri.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sikap mendukung aparat pelaksana adalah relatif baik. Hal ini dilihat dari ketaatan dan tanggung jawab penuh dari pihak pelaksana dalam melakukan tugasnya melaksanakan pembinaan, penataan dan penertiban di lapangan. Sebagai aparat pemerintah yang baik maka dituntut untuk mempunyai sikap ketaatan dan tanggung jawab serta

loyalitas kepada lembaga. Ketaatan dan kepatuhan aparat pelaksana juga dapat dilihat dari kesesuaian antara aparat pelaksana dengan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan program. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan program dilakukan secara luwes saja, karena yang dihadapi manusia, kalau hanya berpegang pada satu aturan saja sudah pasti susah. Sebenarnya aparat bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur baku tetapi kita juga harus bisa melihat situasinya. Ada syarat tertentu yang harus dilaksanakan tetapi bila hal itu benar-benar dilaksanakan, maka akan terjadi benturan. Jadi dalam melaksanakan program kita cenderung memakai pendekatan psikologis sehingga mereka jadi lunak.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Menurut penjelasan di atas, teori dan praktek yang dilaksanakan di lapangan dalam melakukan penertiban, penataan dan pembinaan PKL memang bisa berbeda. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana harus melihat situasi dan kondisi di lapangan yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan kelompok sasaran yaitu PKL.

Aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Berikut ini penjelasan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta :

“Untuk masalah sosialisasi kami memberikan informasi dengan cara *door to door*. Jadi kami mendatangi PKL secara langsung sehingga lebih mengenai sasaran. Hal itu karena pada dasarnya sasaran kami adalah PKL itu sendiri.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Jika pendekatan persuasif sudah tidak mampu mengatasi masalah PKL, maka untuk menghindari tindakan represif, aparat pelaksana melakukan tindakan yustisi. Lebih lanjut penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta berikut ini :

“Jadi ketika masih terdapat pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan Penertiban yang dilaksanakan secara persuasif tapi ketika para PKL nekat maka kita lakukan tindakan yustisi sebagai solusi akhir, peraturan mana yang dilanggar akan diajukan ke pengadilan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Selain itu dukungan dan sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas juga dapat dilihat dari bagaimana pemantauan dan penilaian dilakukan. Pemantauan dilaksanakan setiap hari terhadap PKL yang ada di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Berikut ini penuturan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta berikut ini :

“Setiap tahun dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang paling penting kan penilaian masyarakat. Kalau mereka tidak puas, sudah ada SMS *Hotline* Walikota, ada Kring Solopos sehingga dapat langsung kita respon. Selanjutnya setiap hari Jum’at ada Mider Praja yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sikap aparat pelaksana tersebut tercermin dari pahamnya mereka terhadap tujuan program, ketaatan dan loyalitas terhadap program serta pemantauan dan penilaian aparat pelaksana secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi. Di pihak PKL sendiri, mereka juga memiliki anggapan sendiri tentang sikap aparat pelaksana ketika

melaksanakan tugas. Seperti yang diungkapkan Yeni, seorang PKL kelontong berikut ini :

“Sikap aparat pelaksana memang konsisten pada aturan yang ada. Mereka tidak bertindak kasar. Mereka juga melakukan sosialisasi langsung ke kios satu-persatu.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Senada dengan pendapat di atas, diutarakan oleh Rizal, seorang PKL spesialis *card read*:

“Saya rasa sikap aparat pelaksana sudah cukup baik, mbak. Kirakira satu bulan sebelum direlokasi, sudah ada pemberitahuan juga.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bu Hadi, seorang PKL makanan yang menilai sikap aparat sebagai berikut :

“Aparat pelaksana sudah cukup baik dalam merelokasi. Dengan dilaksanakannya sosialisasi terlebih dahulu, Saya menyadari bahwa keberadaan kami memang mengganggu ketertiban kota. Oleh karena itu, kami mau direlokasi.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Menurut PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang telah relokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres, sikap aparat pelaksana yang tegas tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang ada. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL.

Ada juga di kalangan PKL yang menilai bahwa aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan dan tidak membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang semena-mena

kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh petugas.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami dalam konteks formal seperti rapat, instruksi dan kegiatan sejenis lainnya. Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para *stakeholder*, baik itu Kantor Pengelolaan PKL, PKL, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL. Komunikasi dilakukan dengan maksud menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL sangat ditunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya Pemkot untuk mengenalkan dan menjelaskan program terhadap PKL dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh Pemkot akan tetapi sosialisasi tersebut juga dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL. Biasanya sosialisasi dilaksanakan secara *door to door* kepada PKL. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh

Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta berikut ini :

“Untuk masalah sosialisasi kami memberikan informasi dengan cara *door to door*, mendatangi langsung PKL. Kami juga bekerjasama dengan paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolaan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag. Selain itu kami juga menggunakan media cetak dan brosur untuk sarana sosialisasi.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi penyampaian sosialisasi program oleh aparat pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Yeni seorang PKL kelontong berikut ini :

“Ya sedikit paham aturan, kalau PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara mengganggu kepentingan umum yaitu mengganggu tempat untuk pejalan kaki.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sama halnya dengan penjelasan Nunik, seorang PKL busana dan asesoris sebagai berikut :

“Belum begitu paham, memang kalau jualan di trotoar, tempat umum, taman atau lahan milik pemerintah itu dilarang, tapi gimana lagi Saya juga sudah cukup sudah lama jualan di belakang Kampus Ketingan UNS.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Selama ini komunikasi dalam pelaksanaan program ini telah berjalan secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal maksudnya kerjasama, koordinasi serta media yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada para PKL. Pada komunikasi vertikal ini aparat menggunakan cara *door to door* dan melalui paguyuban PKL. Cara *door to door* di sini

dapat digambarkan bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap para PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara, aparat mendatangi kios satu persatu. Di sini aparat menjelaskan tentang isi Perda yang harus ditaati oleh PKL.

Selain itu komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan, dimana komunikasi ini terlihat dalam penyampaian program dari Pemkot Surakarta atau instansi terkait dengan para PKL. Sedangkan komunikasi horisontal terjadi dalam komunikasi antara instansi dengan otoritas dan unit kerja yang sama atau komunikasi antar aparat pelaksana. Berikut penjelasan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta berikut ini :

“Walikota mengumpulkan Kepala Dinas untuk diberikan *briefing* tentang PKL, UU PKL, Tata Ruang Kota dan Perda PKL yang boleh untuk kegiatan. Setiap kali akan melakukan kegiatan biasanya dilakukan koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi program antar unit dinas seperti Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Satpol PP serta Kantor Pengelolaan PKL. Selanjutnya program disampaikan kepada PKL melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap hari. Dalam penyampaian program diperlukan pendekatan personal dalam memecahkan kebuntuan”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Komunikasi vertikal dalam hal ini antara atasan dengan bawahan juga berjalan dengan baik. Pengenalan program dan prosedurnya disampaikan atasan kepada bawahan melalui rapat masing-masing dinas, melalui surat intruksi dan pengarahan langsung oleh Walikota setiap apel pagi. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta sebagai berikut :

“Aparat kami benar-benar tahu dan paham terhadap tujuan program penertiban PKL, karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di lapangan mereka telah kami *briefing* terlebih dahulu.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sedangkan komunikasi antara bawahan dengan atasan juga berlangsung dengan baik. Di sini terdapat keberanian bawahan dalam mengajukan pendapat, keluhan, saran atau kritik tentang pelaksanaan program. Berikut penuturan dari Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta :

“Saya sering menerima masukan dari bawahan tentang kekurangan sarana dan prasarana dalam menertibkan PKL, kurang kompak dengan aparat pelaksana yang lain serta sikap aparat yang represif.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Dalam menyampaikan pendapat, kritik, saran dan keluhan terdapat mekanismenya, yaitu dari Staff disampaikan kepada Kasi kemudian Kasi baru menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Pendapat, kritik, keluhan serta usulan disampaikan secara lisan dan berusaha dicari jalan keluarnya lewat koordinasi.

Dari data-data di atas disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehingga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

3. Sumber Daya

Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanaan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mengenai sumber daya yang terlibat atau sumber-sumber daya apa saja yang digunakan pada tiap tahap, hampir sama. Aparat yang terlibat dalam program relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara antara lain dari Kantor Pengelolaan PKL berjumlah 12 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM, Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta :

“Pada waktu penertiban kemarin kita melibatkan kelurahan, kecamatan, kantor pengelolaan PKL, Satpol PP, Inspektorat. Dari Kantor pengelolaan PKL berjumlah 12 orang”.
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sedangkan aparat yang dilibatkan dari Satpol PP pada waktu sosialisasi, penataan dan pembinaan berjumlah 2 orang sedangkan pada waktu penertiban kios berjumlah 25 orang, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Drs. Dwi Wuryanto, MM Kepala Bidang Pengelolaan PKL Surakarta :

“Satpol PP yang kita libatkan waktu sosialisasi hanya 2 orang, sedangkan waktu penertiban 25 orang dan pada tahap penataan dan pembinaan kita membutuhkan cukup 2 orang ”.
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Aparat dari Kantor Pengelolaan PKL yang hanya 12 orang, jumlah sangat kurang untuk membina PKL se-Surakarta. Jumlah yang masih kurang dibanding dengan jumlah PKL di Kota Surakarta.

Mobil operasional yang dimiliki oleh Kantor Pengelolaan PKL hanya 1 buah. Sedangkan dana operasional terbesar berasal dari APBD Kota Surakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS,S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta :

“Kantor pengelolaan PKL memiliki 1 buah mobil *pick up*, yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Dana operasional kita berasal dari APBD Kota Surakarta tahun 2009. Selain itu sebagian kecil dana, ada yang berasal dari bantuan hibah provinsi serta dari APBN.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Waktu penertiban para PKL menyewa mobil atau truk sendiri untuk mengangkut barang-barang mereka. Karena dari Kantor Pengelolaan PKL hanya memiliki 1 buah mobil *pick up* dan 1 buah truk. Itu pun dipakai bergantian dengan para PKL. Seperti penjelasan Heri seorang PKL rental komputer sebagai berikut :

“Waktu itu (penertiban tanggal 1 Desember 2009) aparat hanya menyediakan 1 mobil buah mobil *pick up* dan 1 buah mobil truk yang dipakai bergantian, kalau menunggu antrian maka Saya lama untuk memindahkan barang-barang Saya, jadi Saya menyewa truk sendiri untuk mengangkut barang-barang Saya.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kurangnya peralatan seperti mobil dalam penataan dan pembinaan PKL ini menyebabkan mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. Sumber daya yang lain adalah lokasi baru untuk para PKL. Para PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara direlokasi di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Seperti diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta:

“Semua PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara direlokasi di belakang Kantor Kecamatan Jebres yaitu di Pasar Panggunrejo. Para PKL

yang menempati Pasar Panggunrejo tersebut diberikan kios gratis. Selain itu juga mereka diberikan fasilitas seperti MCK dan Mushola.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sumber daya yang dimiliki Pemkot dalam program penataan dan pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil operasional yang dimiliki Kantor Pengelolaan PKL hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu membuat mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.

4. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok sasaran

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan menaati aturan hukum yang berlaku. Apabila kita melihat kondisi kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara pasca relokasi saat ini, tempat tersebut sudah tidak ada kios PKL yang berdiri. Mulai dari gerbang belakang kampus UNS sampai fakultas hukum serta di depan fakultas FISIP.

Kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program merupakan awal dari kesadaran PKL untuk mematuhi apa yang menjadi tujuan program. Tentu saja kesediaan untuk menerima program tidak terlepas dari kepentingan mereka sebagai PKL. Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS,S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta:

“PKL tersebut mentaati aturan karena saat sosialisasi kita yakinkan kalau kita tidak mematikan usaha tapi pemberian kapastian dan kenyamanan usaha. Dalam peraturan itu tidak ada yang namanya kesediaan, namun masyarakat mau tidak mau harus mematuhi. Pada awalnya para PKL tidak mendukung program, mereka menolak dengan alasan di tempat yang baru, mereka akan memulai usaha dari nol lagi. Setelah diadakan sosialisasi dan pembinaan akhirnya banyak PKL patuh dan taat pada aturan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Tidak hanya dari kesediaan PKL untuk menerima program saja, dilihat dari segi pemahaman mereka tentang tujuan program relokasi mereka kurang paham. Berikut ini merupakan pengakuan sejumlah PKL tentang pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Seperti yang diungkapkan Bapak Bondan, seorang PKL penyedia jasa servis elektronik berikut:

“Saya kurang paham tentang aturan yang berlaku, yang saya tahu untuk mengatur pedagang biar tidak semrawut, intinya aturan dibuat untuk menata PKL biar berada di satu tempat. Dengan begitu kan lalu lintas di jalan raya menjadi lancar. “
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sama halnya dengan penjelasan Nunik seorang PKL busana dan asesoris sebagai berikut:

“Belum begitu paham, yang Saya tau kalau jualan di trotoar, tempat umum dan taman itu dilarang, tapi bagaimana lagi, Saya juga sudah cukup lama jualan di depan Kecamatan Jebres.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kekurangpahaman PKL terhadap aturan menyebabkan ada beberapa PKL yang masih melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga didorong dengan tujuan program yang kurang berpihak pada kepentingan PKL sehingga memunculkan adanya pro dan kontra. Di

antara mereka ada yang mendukung dan menyetujui program dan beberapa yang menolak serta tidak setuju.

Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah kejelasan informasi yang menyebabkan PKL kurang paham dengan maksud dan tujuan program, sehingga mereka enggan untuk mematuhi aturan. Selain itu tingkat pendidikan PKL yang berbeda-beda namun umumnya berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan untuk membuat sadar PKL dalam menaati aturan.

Ketidaksetujuan adanya program relokasi ini dapat diketahui dari pengakuan Bapak Edi, seorang PKL busana dan asesoris sebagai berikut:

“Tidak setuju, sebenarnya di satu pihak tujuan pemerintah bagus, tapi di pihak lain yaitu Saya sebagai PKL dirugikan, masalahnya di belakang Kantor Kecamatan Jebres ini lokasinya tidak strategis.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sama halnya dengan pendapat Heri seorang PKL rental komputer sebagai berikut:

“Saya tidak setuju, di sini (belakang Kantor Kecamatan Jebres) tempatnya kurang strategis. Di sini jangan untung, bisa-bisa modal saya habis untuk makan dan minum saja.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Ada pula PKL yang setuju dengan adanya program. Dukungan itu dibuktikan dengan kesediaan direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumadi, seorang PKL fotokopi berikut ini:

“Saya menerima relokasi, disuruh pindah ya pindah. Memang PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara itu mengganggu, menyebabkan kesemrawutan dan kekumuhan.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Demikian halnya penjelasan yang diutarakan oleh Bapak Bondan, seorang PKL yang menyediakan jasa servis elektronik berikut ini:

“Saya setuju-setuju aja mbak dengan relokasi ini, asalkan kita direlokasi secara bersama-sama. Jadi di tempat baru tetap ramai dengan pedagang.”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Begitu pula dengan pengakuan Yeni, seorang PKL kelontong sebagai berikut:

“Sebagai warga Solo, Saya setuju aja mbak, pemerintah itu kan tugasnya mengatur masyarakatnya. Yang penting PKL tidak dilarang jualan”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Aparat dalam melakukan relokasi menggunakan cara-cara yang penuh keakraban dan santun sehingga PKL menerima dengan baik penjelasan maupun perintah dari Pemkot. Hal ini terbukti para PKL bersedia membongkar kios mereka yang menempel di dinding pagar kampus Ketingan UNS. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Rizal, seorang PKL spesialis *card read* berikut ini:

“Pada tanggal 1 Desember kemarin, Saya membongkar sendiri kios Saya dan memindahkan semua barang barang Saya ke sini (belakang Kantor Kecamatan Jebres).”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Sama halnya dengan penjelasan Bapak Suroso, seorang PKL makanan sebagai berikut:

“Saya membongkar sendiri kios Saya, karena sebelumnya aparat sudah memberi perintah kepada Saya untuk segera membongkar kios dan segera pindah ke sini. (belakang Kantor Kecamatan Jebres)”
(Wawancara, 23 Februari 2010)

Gambar III.6
Pembongkaran kios PKL Tahun 2009 dan
kondisi kios pasca relokasi Tahun 2010



Sumber: www.tatv.ac.id

Berdasar pernyataan di atas, diketahui bahwa mayoritas PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara mendukung terhadap pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL belakang Kampus UNS di relokasi ke tempat baru di belakang Kantor Kecamatan Jebres.

Tabel IV.2
Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Relokasi
PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara

No	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL	Hasil	Analisis
1.	Sikap Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> -Konsisten terhadap aturan -Tahu dan paham tujuan program -Luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi 	<p>Aparat pelaksana secara keseluruhan dalam melaksanakan program telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat seringkali bersikap represif.</p>
2.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi antar instansi terkait cukup baik -komunikasi vertikal antara aparat dengan PKL kurang baik. -Sosialisasi program cukup dipahami walaupun masih ada PKL yang belum paham. -Tingkat pemahaman PKL terhadap aturan tinggi 	<p>Komunikasi sudah berjalan baik di kalangan antar instansi tetapi antara aparat dengan PKL kurang baik. Hal ini berarti penyampaian sosialisasi program kurang berjalan lancar. Tetapi PKL memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga PKL bersedia untuk ditata.</p>
3.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> -Dari kantor Pengelolaan PKL berjumlah 12 orang. -Sedangkan dari Satpol PP pada waktu sosialisasi, penataan dan pembinaan berjumlah 2 orang, pada waktu penertiban berjumlah 25 orang. -Menggunakan 1 buah mobil operasional 	<p>Dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.</p>

4.	Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran	-Sudah baik, bersedia menerima program dan memahami tujuan program serta diikuti dengan kepatuhan menaati aturan yaitu dengan bersedia membongkar kios mereka dan pindah ke tempat kios yang baru secara tertib.	Mendukung terhadap Program Pembinaan dan Penataan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi.
----	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data-data di atas membuktikan bahwa faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran selama ini telah mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL. Dimana efektivitas kebijakan relokasi PKL nampak ketika tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini berarti faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan usaha pencapaian tujuan.

Pada dasarnya beberapa faktor tersebut mendukung pencapaian tujuan (efektivitas kebijakan). Apabila dilihat dari faktor sikap pelaksana, dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi yang telah ditetapkan, aparat pelaksana telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian jika dilihat dari faktor komunikasi, maka komunikasi sudah berjalan baik di kalangan antar instansi, hanya saja kendalanya yaitu komunikasi antara aparat dengan PKL yang kurang baik. Akan tetapi pada akhirnya PKL memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga mau ditata. Lalu apabila dilihat dari faktor sumber daya, sejumlah pegawai dari Kantor Pengelolaan PKL dan Satpol PP dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara

guna mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*. Namun demikian, mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal, karena dalam melaksanakan tugasnya hanya menggunakan 1 buah mobil operasional. Kemudian apabila dilihat dari faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka masyarakat PKL sebagai kelompok sasaran nyatanya menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi.

Dengan demikian nampak jelas bahwa beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. Faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran mendukung pencapaian tujuan, sehingga pada akhirnya tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*.

Sebuah kegiatan dianggap berhasil tidak hanya dilihat dari apakah kegiatan tersebut sudah mencapai tujuannya atau belum, tetapi juga dilihat berdasarkan indikator lainnya yang memenuhi. Dari pendapat Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) diambil 3 kriteria yang dianggap paling berpengaruh dalam memenuhi keberhasilan suatu kegiatan yaitu:

a) Pencapaian tujuan atau hasil

Dengan melihat pada tahap-tahap kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti tahap sosialisasi, tahap penertiban, tahap penataan dan tahap pembinaan, maka kegiatan dalam hal ini pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara dianggap telah berhasil yaitu nampak pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan kebijakan tersebut adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*.

b) Efisiensi

Kondisi Pasar Panggungrejo masih belum ramai akan pelanggan. Hal itu diperparah lagi dengan tutupnya beberapa kios yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh PKL untuk melanjutkan usaha mereka. Padahal dana yang dianggarkan untuk membangun Pasar Panggungrejo beserta fasilitas-fasilitasnya cukup besar. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta berikut:

”Pembangunan Pasar Panggungrejo menggunakan dana sekitar Rp 4,2 miliar dengan fasilitas cukup lengkap, termasuk areal parkir cukup memadai. Kios di Pasar Panggungrejo tersebut diberikan secara gratis, termasuk surat izin penempatan (SIP), hingga keberadaan mereka terjamin.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Kios di Pasar Panggungrejo tersebut masih banyak yang tutup. Lebih lanjut Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggungrejo menjelaskan mengenai banyak kios yang kadang buka, kadang tutup berikut ini:

“Banyak kios yang sering tutup. Hal itu dikarenakan para PKL itu belum siap untuk menempati kios di Pasar Panggungrejo ini. Hal itu salah satunya selain karena di sini belum ramai, juga belum ada pinjaman lunak dari Pemkot untuk menambah modal usaha dagang di sini. Akan tetapi kami sedang mengusahakan untuk pembuatan proposal kepada Pemkot guna mendapatkan pinjaman lunak dari Pemkot. Beberapa PKL yang sering menutup kios di sini ternyata telah mengontrak di tempat lain yang mereka anggap lebih strategis dibanding di sini.”
(Wawancara, 7 April 2010)

Dengan menggunakan dana sebanyak itu dan melihat kondisi di Pasar Panggungrejo yang sekarang ini masih banyak kios yang tutup. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan relokasi tersebut kurang berhasil, karena tidak memenuhi kriteria efisien. Dimana seharusnya dengan penggunaan dana yang cukup besar untuk membangun kios di Pasar Panggungrejo, seharusnya kios-kios tersebut juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang.

c) Kepuasan kelompok sasaran

Kebijakan relokasi PKL di Pasar Panggungrejo ini memang berhasil dalam mencapai tujuan yaitu dengan berhasilnya mengosongkan tempat PKL berjualan yaitu di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan kemudian memindahkannya di belakang Kecamatan Jebres (Pasar Panggungrejo). Akan tetapi ternyata di

tempat yang baru yaitu di Pasar Panggunrejo, selain mengeluhkan soal pembagian kios atau distribusi kios yang tidak merata, banyak pula PKL yang mengeluhkan karena kondisi pasar yang masih belum ramai akan pelanggan. Hal itu seperti yang diutarakan oleh Bapak Sumada, seorang PKL fotokopi berikut ini:

”Di Pasar Panggunrejo ini belum ramai mbak, masih sepi dari pelanggan. Jika dibandingkan dengan tempat yang dulu, di depan Kecamatan Jebres, jauh lebih ramai di sana. Apalagi jasa fotokopi saya ini, mahasiswa itu inginnya yang praktis-praktis. Jadi jika hanya untuk fotokopi beberapa lembar saja, sudah pasti lebih memilih tempat yang dekat dengan jalan. Jika di sini, mungkin kurang praktis karena harus masuk-masuk, apalagi ada biaya parkir. Akan tetapi, pada dasarnya Saya menyetujui relokasi ini, mungkin Pemkot lebih mengusahakan lagi bagaimana supaya Pasar Panggunrejo ini menjadi ramai.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Edi seorang PKL busana dan asesoris berikut ini:

”Di sini sudah hampir tiga bulan, tapi belum ada kemajuan. Dagangan Saya belum ada yang laku. PKL seperti Saya ini kan seharusnya berjualan di tempat yang dekat dengan jalan, sehingga masyarakat dapat menjangkaunya dengan lebih mudah.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Bondan seorang PKL servis elektronik sebagai berikut:

”Ya jika dibandingkan dengan tempat yang dulu, memang jauh lebih ramai yang dulu. Hal itu karena dekat dengan jalan besar dimana banyak orang yang berlalulalang. Kalau di sini letak tempatnya kurang strategis, karena harus masuk-masuk gang. Buat mahasiswa misalnya, hal itu menjadi tidak praktis.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Nunik seorang PKL busana dan asesoris juga mengatakan hal yang sama berikut ini:

”Pasar Panggungrejo ini belum ramai mbak. Banyak orang yang belum tau, karena letaknya kurang strategis. Sulit juga memperoleh pelanggan kalau Pasar Panggungrejo masih sepi begini.”

(Wawancara, 11 Maret 2010)

Letak pasar yang kurang strategis membuat pasar kurang dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, para PKL memiliki inisiatif bersama menggalang dana untuk membuat spanduk besar yang diletakkan di kawasan dekat dengan jalan. Spanduk itu berisi tulisan Pasar Panggungrejo serta kios-kios apasaja yang ada di sana, misalnya kios makanan, kelontong, rental, dan lain sebagainya. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tahu keberadaan Pasar Panggungrejo.

Selain itu juga sebagai solusi atas keadaan pasar yang belum ramai pelanggan, maka pemerintah mengadakan *even* Senin Ceria. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta berikut ini:

”*Even* diadakan setiap hari Senin. Kegiatannya ada yang berupa pertunjukan musik (band, dangdut). Selain itu juga ada pertunjukan reog. Semuanya itu dimaksudkan agar suasana di Pasar Panggungrejo menjadi ramai.”

(Wawancara, 23 Februari 2010)

Akan tetapi pada kenyataannya *even* tersebut memang belum cukup untuk membuat pasar menjadi ramai. Situasi pasar

masih belum ramai pelanggan. Itu disebabkan *even* tersebut tidak mencapai pada sarannya, yaitu pengunjung, yang kebanyakan adalah mahasiswa. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Rizal seorang PKL spesialis *card read* berikut ini:

“Untuk menarik pengunjung, di sini diadakan *even* Senin Ceria. *Even* itu dilaksanakan setiap hari Senin siang. Ada dangdut, reog, dan band juga. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum cukup untuk menarik pengunjung, sehingga di sini masih sepi-sepi saja. Saran Saya daripada kegiatan seperti itu, lebih baik membuat iklan yang mengenalkan Pasar Panggungrejo ini. Bisa melalui melalui koran ataupun juga menempel spanduk di tempat yang strategis.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Keadaan pasar yang belum ramai tersebut membuat penurunan pendapatan bahkan sampai terjadi penurunan pendapatan drastis pada PKL. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Suroso, PKL makanan berikut ini:

”Penghasilan Saya dari berjualan makanan di sini menjadi sedikit, terjadi penurunan yang drastis mbak. Ibaratnya dulu bisa mendapatkan Rp 900.000,00 per bulan, sekarang ini cuma Rp 100.000,00 per bulan. Hal itu karena 90% konsumen saya adalah mahasiswa, yang mungkin saat pagi sekalian ke kampus sarapan dulu atau setelah dari kampus dengan mudahnya dulu mampir ke warung Saya, karena dekat dengan jalan besar. Kalau sekarang, jarang yang mampir ke warung Saya karena letaknya memang kurang strategis.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sumadi, seorang PKL fotokopi berikut ini:

“Di sini penghasilan Saya turun drastis. Itu dikarenakan letak pasar yang terlalu masuk ke dalam, jadi belum banyak masyarakat yang tau.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Menanggapi hal tersebut, Bapak Didik Anggono HK,S.S.HUT, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL Surakarta menjelaskan bahwa semuanya itu membutuhkan waktu. Beliau yakin bahwa nantinya, Pasar Panggunrejo akan menjadi ramai karena cukup dekat dengan jalan raya dan pusat keramaian kota. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Rizal seorang PKL spesialis *card read* berikut ini:

“Pasar Panggunrejo ini akan ramai ketika semua kios di sini buka semua. Sekarang ini yang buka, cuma ada beberapa kios saja, sedangkan yang lain hanya kadang buka, kadang tutup begitu saja. Membutuhkan waktu memang untuk membuat pasar menjadi ramai.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Selain hal tersebut di atas, juga ada beberapa keluhan lain seperti yang diungkapkan Heri seorang PKL rental komputer berikut ini:

“Bangunan kios di atas itu kalau hujan pasti banjir. Itu harusnya diberi *tedeng* untuk penghalang air hujan masuk ke depan kios. Karena sejauh ini, kios di atas itu jalannya berkubang air karena kemasukan air hujan. Sebaiknya Pemkot segera mengatasi hal ini, supaya para PKL khususnya yang menempati kios atas itu bisa beraktivitas dengan nyaman.”
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Sampai sekarang kios-kios di Pasar Panggunrejo belum ramai. Dari segi promosi juga kurang mengena sasaran atau pelanggan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Rizal seorang PKL spesialis *card read* berikut ini:

“Sejauh ini diadakan *Even* Senin Ceria yang berupa kegiatan seperti dangdut, reog dan band. Hasilnya kegiatan tersebut tidak cukup berhasil dalam menarik pelanggan.

Karena konsumen kita kebanyakan mahasiswa, agar menarik pengunjung maka lebih baik disediakan fasilitas *hotspot* di sini. Saya rasa dengan hal itu, malah dapat secara lebih baik dalam menarik pengunjung.“
(Wawancara, 11 Maret 2010)

Menanggapi hal tersebut, Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggungrejo menjelaskan bahwa pada dasarnya usulan itu sangat bagus. Apalagi mengena sasaran para PKL di sini yaitu mahasiswa. Dengan adanya fasilitas *hotspot* kemungkinan besar Pasar Panggungrejo akan ramai pengunjung. Namun untuk mewujudkan semua itu, sekarang ini masih terbatas pada dana. Ketika dana sudah tersedia, pasti akan diusahakan untuk mengarah ke sana yaitu menyediakan fasilitas *hotspot* di Pasar Panggungrejo ini.

Adapun permasalahan baru muncul ketika PKL merasa keberatan dengan adanya biaya retribusi sebesar Rp. 1.100,00 per hari. Masalahnya kondisi pasar masih sepi, karena itu pemasukan juga masih sedikit. Namun pihak pengelola pasar mempunyai alasan yang jelas menanggapi hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak R. Sigit Pramono, Kepala Pasar Panggungrejo berikut ini:

“Pasar memungut retribusi ini juga untuk membayar penggunaan listrik yang telah digunakan para PKL. Memang pada awalnya banyak dari PKL merasa keberatan dengan hal itu. Akan tetapi, setelah diberikannya pengarahan, PKL mau menerima akan adanya biaya retribusi tersebut. Hal itu juga karena demi kepentingan PKL.“
(Wawancara, 7 april 2010)

Berdasarkan indikator keberhasilan kegiatan di atas, antara lain: pencapaian tujuan, efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka dapat diketahui bahwa hasil dari kebijakan relokasi tersebut dikatakan efektif apabila dilihat dari indikator pencapaian tujuan. Hal itu karena berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan pula kawasan asri terkait dengan pembangunan Solo *Techno Park*.

Akan tetapi jika dilihat dari indikator efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapai efisiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena distribusi kios yang tidak merata (ada PKL bengkel dan makanan yang mendapat kios di atas), letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL. Serta beberapa masalah bangunan seperti lantai atas dan tangga yang sering tergenang air ketika hujan.

Kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para pedagang pasar. Hal itu karena kondisi pasar masih belum ramai pelanggan sehingga pendapatan PKL turun drastis. Selain itu juga kondisi bangunan pasar juga kurang baik. Hal itu terlihat

dari kios di bagian atas sering terdapat genangan air hujan karena tidak adanya saluran pembuangan air. Selain itu juga kondisi tangga yang juga tergenang air ketika hujan karena tidak ada kanopi.

Pasca relokasi, seperti yang kita lihat sekarang ini, tanah tersebut terlihat sepi dan belum termanfaatkan. UNS sendiri hanya bertanggungjawab terbatas pada pagar. Sedangkan untuk perbaikan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot. Seperti yang diungkapkan Sunit Marwoko, Kabag Perencanaan Pembangunan UNS berikut:

”Pagar itu punya kita, jadi merupakan tanggung jawab kita. Kalau untuk tanah itu adalah milik negara. Untuk perbaikan pagar masih menunggu skala prioritas anggaran. Rencana perbaikan pagar itu ada. Namun, untuk tahun 2010 ini tampaknya belum akan dilaksanakan. Karena kita masih memikirkan anggaran untuk prioritas ke mahasiswa. Misalkan, untuk melengkapi fasilitas di dalam gedung, pendirian gazebo dan sebagainya.”
(Wawancara 29 Maret 2010)

Rencana dari Pemkot, tanah itu nantinya akan dijadikan trotoar bagi pejalan kaki sehingga jalan akan terlihat lebih rapi dan sedap dipandang. Salah seorang pedagang penjual makanan yang kini telah dipindahkan di Pasar Panggungrejo juga mengatakan bahwa tanah itu akan dijadikan trotoar.

“Setahu saya, tanah di belakang kampus itu akan dijadikan trotoar biar bagus, semacam *citywalk*. Desainnya pun sudah ada, kita sudah melihat. Jadi ya kita mau mau saja dipindahkan ke Pasar Panggungrejo.”
(Wawancara 6 April 2010)

Jadi berita mengenai UNS yang akan mendirikan ruko di lahan tersebut adalah tidak benar. Melainkan rencana pemabangunan ruko akan

dilaksanakan di dalam kampus. Senada dengan yang diungkapkan oleh

Yanto, Sekretaris Pembantu Rektor IV berikut ini:

”Dalam rangka persiapan menuju Badan Hukum Pendidikan (BHP) dimana UNS harus mempunyai sumber pendanaan sendiri. UNS berencana mendirikan bengkel, ruko dan hotel sebagai usaha komersial. UNS sedang menawarkan bentuk kerjasama dengan calon investor untuk menanamkan modalnya pada berbagai perencanaan kerabat mahasiswa yang wisuda. Bengkel mobil dan sepeda motor yang sudah ada akan diperluas. Dan pembangunan bengkel, ruko serta hotel tersebut dilaksanakan di dalam kampus UNS, bukan di luar kampus.”

(Wawancara 29 Maret 2010)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa tanah di belakang Kampus Ketingan UNS itu akan dijadikan trotoar bagi pejalan kaki sehingga jalan akan terlihat lebih rapi dan sedap dipandang. Sedangkan pembangunan bengkel, ruko serta hotel rencananya akan dilaksanakan di dalam Kampus Ketingan UNS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam Bab IV tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggunrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya Solo *Techno Park*. Hal itu nampak pada terlaksananya dengan cukup baik program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, dimana program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi Kebijakan, Penertiban, Penataan dan Pembinaan.

Dimana dalam tahap sosialisasi, beberapa PKL akhirnya memahami terhadap program kebijakan relokasi; dalam tahap penertiban memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini nampak dari kerelaan PKL Kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara untuk direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres dengan tertib; dalam tahap penataan juga

berjalan lancar meskipun ada beberapa hambatan antara lain tempatnya kurang strategis dan di tempat yang baru saluran resapan air tidak baik, sehingga menyebabkan banjir; sedangkan dalam tahap pembinaan, kegiatan pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku. Akan tetapi bantuan pinjaman lunak belum ada karena belum terbentuk koperasi.

Hasil dari kebijakan relokasi tersebut dikatakan efektif apabila dilihat dari indikator hasil yaitu pencapaian tujuan. Hal itu karena berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan pula kawasan asri terkait dengan pembangunan Solo *Techno Park*.

Akan tetapi jika dilihat dari indikator hasil yang lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapai efisiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL. Serta beberapa masalah bangunan seperti kondisi bangunan pasar yang kurang baik. Hal itu terlihat dari kios di bagian atas sering terdapat genangan air hujan karena tidak adanya saluran pembuangan air. Selain itu juga

kondisi tangga yang juga tergenang air ketika hujan karena tidak ada kanopi.

Kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para pedagang pasar. Hal itu karena kondisi pasar masih belum ramai pelanggan sehingga pendapatan PKL turun drastis.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan relokasi PKL yaitu dapat dilihat dari faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Dimana efektivitas kebijakan relokasi PKL nampak ketika tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Hal ini berarti faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan usaha pencapaian tujuan.

Pada dasarnya beberapa faktor tersebut mendukung pencapaian tujuan (efektivitas kebijakan). Apabila dilihat dari faktor sikap pelaksana, dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi yang telah ditetapkan, aparat pelaksana telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian jika dilihat dari faktor komunikasi, maka komunikasi sudah berjalan baik di kalangan antar instansi, hanya saja kendalanya yaitu komunikasi antara aparat dengan PKL yang kurang baik. Akan tetapi pada akhirnya PKL memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga mau ditata. Lalu apabila dilihat dari faktor sumber daya, sejumlah pegawai dari Kantor

Pengelolaan PKL dan Satpol PP dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara guna mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*. Namun demikian, mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal, karena dalam melaksanakan tugasnya hanya menggunakan 1 buah mobil operasional. Kemudian apabila dilihat dari faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka masyarakat PKL sebagai kelompok sasaran nyata menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi.

Dengan demikian nampak jelas bahwa beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara. Faktor sikap pelaksana, faktor komunikasi, faktor sumber daya, serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran mendukung pencapaian tujuan, sehingga pada akhirnya tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan kawasan yang asri sehubungan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*.

B. Saran

Saran-saran yang dapat Peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kondisi tempat relokasi yang masih belum ramai oleh pelanggan, maka Pemkot harus segera turun tangan untuk membantu mempromosikan tempat relokasi yang baru melalui media promosi dengan lebih gencar serta membuat suatu program atau kegiatan yang menarik pelanggan. Mahasiswa merupakan sasaran para pedagang di Pasar Panggunrejo. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kegiatan yang pastinya menarik bagi kalangan mahasiswa khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal itu antara lain dengan melakukan hal-hal seperti:
 - a. Pembangunan area *hotspot* di Pasar Panggunrejo. Sekarang ini, mahasiswa sangat dekat dengan dunia internet. Untuk itu, Pemkot perlu mengadakan suatu program dimana menyediakan fasilitas *hotspot* di area Pasar Panggunrejo. Hal itu dimaksudkan agar ramai dengan pelanggan terutama mahasiswa.
 - b. Selain itu juga dapat diadakan sebuah pameran dengan menggunakan lokasi di Pasar Panggunrejo tersebut. Misalnya saja pameran komputer yang memang digemari oleh kebanyakan mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Dengan mengadakan *event* seperti itu, dapat sekaligus sebagai pengenalan lebih dekat terhadap keberadaan Pasar Panggunrejo.

- c. Mahasiswa sangat tertarik ketika ada barang diskon, apalagi dengan diskon yang cukup besar. Jadi, untuk beberapa kios seperti kios pakaian ataupun juga kios asesoris, ada baiknya mengadakan diskon untuk barang-barang yang mereka jual. Selain itu juga untuk kios makanan, dapat mengadakan paket murah untuk pelanggan.
2. Setelah dipindah di lokasi baru, para pedagang pasar tersebut seharusnya diberikan pembinaan, terutama supaya para pedagang pasar dengan tertib menjalankan usahanya di kios yang telah diberikan. Dan bagi mereka yang tidak pernah membuka kios mereka, harus diberi sanksi yang tegas dari Pemkot.
3. Dalam merelokasi perlu diperhatikan lagi masalah pembangunan kios dan pembagian kios. Dimana pembangunan kios harusnya berdasarkan data jumlah PKL yang ada saat itu dan juga jenis usaha PKL yang ada, sehingga tidak ada yang kurang ataupun kelebihan kios. Adapun pembagian kios harus disesuaikan dengan jenis usaha para PKL. Seperti contohnya: untuk kios makanan di bawah semua, kemudian kios di atas, bisa digunakan untuk kios fotokopian, rental dan lain-lain. Sedangkan untuk usaha bengkel, itu harus ditempatkan di kios di bawah dan terpisah dari kios lainnya.
4. Kondisi Pasar Panggungrejo yang masih banjir ketika hujan datang, itu harus segera diatasi dengan dilakukannya pembangunan kembali di beberapa titik. Seperti kios di bagian atas sering terdapat genangan air

hujan karena tidak adanya saluran pembuangan air, maka perlu dibangun saluran pembuangan air. Selain itu juga kondisi tangga yang juga tergenang air ketika hujan karena tidak ada kanopi, maka perlu dibangun kanopi.

5. Masalah keamanan di Pasar Panggunrejo juga harus lebih diperhatikan kembali, mengingat daerah di sekitar pasar yang rawan dengan pencurian motor serta beberapa preman yang ada. Hal itu dimaksudkan agar para pedagang dan pembeli merasa nyaman di Pasar Panggunrejo.
6. Trotoar yang tadinya ditempati oleh PKL itu, sebaiknya segera diadakan pembangunan, yang rencananya akan dibangun area seperti *city walk*. Hal tersebut supaya trotoar tidak ditempati PKL untuk berjualan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ferry, R. Anggoro Suryokusumo. 2008. *Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Lima sebagai realita urbanisasi dalam rangka menuju Bandung kota indah..* Jakarta: CV Rajawali
- Moleong, J Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Malang: INSPIRE
- Pariata Werstra, Sutarto & Ibnu Syamsi. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: CV. HajinMas Agung
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sedah Ayu Fitriani. 2006. Skripsi. *Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Desa Ekonomi Simpan Pinjam di Kabupaten Pati*. Surakarta: (Tidak diterbitkan) FISIP UNS.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Tadjuddin Noer Effendi. 1995. *SDM Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber dari internet:

John C. Cross, Ph.D. 2000. *Street Vendors, Modernity and Postmodernity: Conflict and Compromise in The Global Economy International Journal*. Vol. 20: 30-52. Diakses tanggal 5 Desember 2009 pukul 11.30 dalam www.emeraldinsight.com

Ray Bromley.2000. *Street vending and public policy: a global Review International Journal*. Vol.20: 1-29. Diakses tanggal 5 Desember 2009 pukul 11.35 dalam www.emeraldinsight.com

Murtanti Jani Rahayu.2007. *Jurnal Nasional: Kajian Karakteristik PKL Pagar Belakang Kampus Universitas sebelas Maret Kentingan Surakarta*. Vol.2: 25-34. Diakses tanggal 20 April 2010 pukul 11.30 dalam pipw.lppm.uns.ac.id

Analisis kebijakan "Relokasi Pkl Di Pasar 16 Ilir Ke Pasar Retail Jaka Baring Palembang" (Peraturan Wali Kota Palembang no 5.a. Tahun 2005 dalam [http:// realitassemu.blogspot.com](http://realitassemu.blogspot.com) diakses tanggal 5 Desember 2009 pukul 11.07

PPSK Berang Tak Dilibatkan Dalam Proses Pendataan Relokasi PKL dalam quilljournal.wordpress.com diakses tanggal 16 November 2009 pukul 10.25

Solo Bertekad "Memanusiakan" PKL dalam www.lifestyle.id.finroll.com diakses tanggal 17 November 2009 pukul 09.45

Sumber lain:

Laporan Akhir Survei dan Pemetaan PKL di Surakarta 2007